



# LKJIP 2023

## LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH 2023



**DINAS KELAUTAN & PERIKANAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

JALAN UNDATA NO 7 PALU, 94111  
TELEPON (0451) 421560 , FAKS (0451) 429379  
EMAIL : dkpprovsulteng@gmail.com WEB : dkp.sultengprov.go.id

**KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Hidayah dan Rahmat-Nya, penulisan dan penyusunan "**Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKJIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**" dapat terselesaikan. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya penyelenggaraan *good governance*, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai pelaksana kegiatan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan.

LKJIP ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai pencapaian kinerja yang dicapai Provinsi Sulawesi Tengah yang tidak lain juga menunjukkan kinerja instansi sepanjang tahun 2023.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKJIP ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu, kritik dan saran membangun sangat diperlukan sebagai modal dasar perbaikan dan pengembangan pembangunan kelautan dan perikanan di masa mendatang. Pada kesempatan ini pula kami mengaturnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini.

Palu, Januari 2024

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



**MOH. ARIF LATJUBA, SE, M.Si**

NIP. 196604181992031009

**DAFTAR ISI**

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	1
BAB I. PENDAHULUAN .....	3
1.1 Cascading Kinerja .....	3
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	5
1.3 Isu-Isu Strategis .....	50
1.4 Dukungan SDM dan Sarana Prasarana .....	52
1.5 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 .....	53
BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....	58
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja .....	58
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....	61
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023 .....	65
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	79
2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 .....	82
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	86
3.1 Capaian Kinerja .....	86
3.2 Realisasi Anggaran .....	144
3.3 Inovasi .....	145

3.3 Penghargaan .....	148
BAB IV. PENUTUP .....	149
4.1 Kesimpulan .....	149
4.2 Saran .....	149
Lampiran .....	151

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1 Aset Tetap Per 31 Desember 2022 .....	53
Tabel 2 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 .....	54
Tabel 3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DKP Sulteng	60
Tabel 4 Sasaran Strategis dan IKU Dinas .....	62
Tabel 5 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	64
Tabel 6 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Langsung Penapaian Sasaran Tahun 2023 .....	69
Tabel 7 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2023 .....	75
Tabel 8 IKU DKP Sulteng Tahun 2023 .....	80
Tabel 9 Alokasi Anggaran APBD dan APBN Tahun 2023 .....	85
Tabel 10 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	86
Tabel 11 Target dan Realisasi DKP Sulteng Tahun 2023.....	87
Tabel 12 Capaian NTP Sulteng Tahun 2023.....	89
Tabel 13 Kawasan Konservasi Perairan di Sulteng sampai dengan Tahun 2023 .....	91
Tabel 14 Produksi Perikanan Tahun 2023 per kab/Kota .....	93
Tabel 15 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 s/d 2023	95
Tabel 16 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah di Renstra 2021 - 2026.....	98
Tabel 17 Perbandingan Capaian IKU Dinas dengan Capaian Nasional tahun 2023 .....	99
Tabel 18 Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan DKP Tahun 2023 .....	103

Tabel 19 Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 .....	118
Tabel 20 Efisiensi Anggaran tahun 2023 Berdasarkan Sasaran Strategis .....	121
Tabel 21 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keber hasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Taqhun 2023 .....	122
Tabel 22 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis	142
Tabel 23 Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja TA. 2023 DKP Prov. Sulteng.....	144
Tabel 24 Alokasi dan Realisasi APBN DKP Prov. Sulteng 2023	145

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 1 Cascading DKP Sulteng .....	4
Gambar 2 Bagan Struktur Organisasi DKP Sulteng .....	5
Gambar 3 Struktur Organisasi UPTD Balai Perbenihan .....	6
Gambar 4 Struktur Organisasi UPTD PMHP .....	6
Gambar 5 Struktur Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I .....	6
Gambar 6 Struktur Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II .....	7
Gambar 7 Struktur Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III .....	7
Gambar 8 Struktur Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah IV .....	7
Gambar 9 Struktur Organisasi UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banggai .....	8
Gambar 10 Struktur Organisasi UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Morowali.....	8
Gambar 11 Struktur Organisasi UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Donggala, Buol dan Toli-Toli.....	9
Gambar 12 Struktur Organisasi UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tomini .....	9
Gambar 13 Jumlah ASN berdasarkan Golongan/Ruang dan Pendidikan.....	52
Gambar 14 Jumlah ASN berdasarkan Gender .....	52
Gambar 15 NTP Sulteng Tahun 2022-2023 .....	96

Gambar 16 Halaman Depan Sistem Informasi Pengelolaan Ruang Laut .....	146
Gambar 17 Pelatihan Inovasi Sampah Plastik Menjadi BBM....	147
Gambar 18 SAKIP A DKP Sulteng Tahun 2022 .....	148

**EXECUTIVE SUMMARY**

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah (DKP Sulteng) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. DKP Sulteng terbagi dalam 1 sekretariat, 4 bidang dan 10 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan mempunyai fungsi dalam: (1) Perumusan Kebijakan dibidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; (2) Pelaksanaan kebijakan dibidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; (3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; (4) Pelaksanaan administrasi dinas perikanan bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan (5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya yang dalam pelaksanaannya didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 147 orang personel.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKJIP) disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKJIP ini menyajikan capaian kinerja DKP Sulteng tahun 2023 yang diperbandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2023 yang menggambarkan keberhasilan DKP Sulteng dalam pelaksanaan tugasnya pada tahun pertama dari Renstra 2021-2026.

Secara umum capaian sasaran strategis DKP Sulteng tahun 2023 sebesar 105,19%. Evaluasi upaya mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh DKP Sulteng diukur melalui capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari 6 (enam) IKU yang ditetapkan, 5 (lima) IKU mencapai atau melebihi target yang ditetapkan dan 1 (satu) IKU yang belum mencapai target, yang mana juga masih merupakan angka/data sementara. Uraian IKU DKP Sulteng tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut:

- (1) Indeks reformasi birokrasi 67,44 dari target 64 atau 105,38%;
- (2) Nilai Tukar Perikanan 103,12 dari target 100,8 atau 102,30%;
- (3) Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial 18,22 dari target 19,98 atau mencapai 91,19%;
- (4) Produksi Perikanan 1.052.510,18 ton dari target 972.693,75 ton atau sebesar 108,21%;

- (5) Angka Konsumsi Ikan 67,36 kg/perkapita/tahun dari target 57,05 kg/perkapita/tahun atau sebesar 118,07%;
- (6) Jumlah Hari Operasi Pengawasan SDKP 265 hari operasi dari target 250 hari operasi atau sebesar 106,00%.

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis, DKP Sulteng mendapatkan alokasi anggaran APBD sebesar Rp98.408.510.938,- yang terealisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp91.520.867.254,- atau 93,00%. Selain APBD, DKP Sulteng juga mendapat alokasi APBN Dekonsentrasi sebesar Rp2.268.862.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2023 dana APBN terealisasi Rp2.245.804.404,- atau sebesar 98,98%.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih dijumpai beberapa kendala dan kelemahan yang akan dijadikan catatan penting untuk peningkatan dan perbaikan di masa yang akan datang.

Palu, 31 Januari 2024

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MOH. ARIF LATUJUBA, SE, M.Si  
NIP. 196504181992031009

\*) Angka sementara

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. CASCADING KINERJA

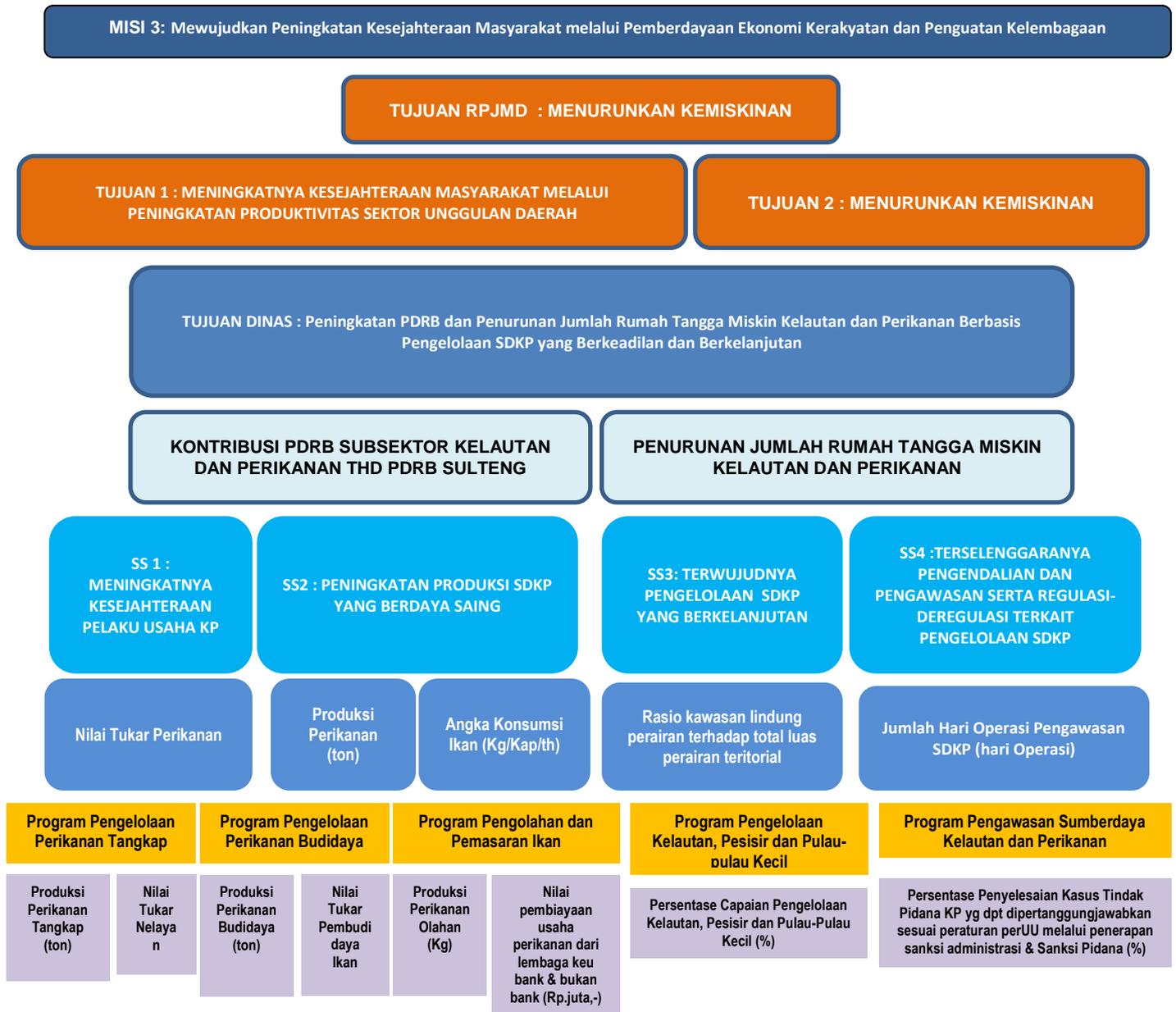
Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKJIP) disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Tahun 2023 merupakan tahun ke-dua dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2021-2026 yang mana pembangunan kelautan dan perikanan terkait pada Misi 3 (tiga) "*Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan*". Misi Kepala Daerah ini diterjemahkan kedalam program dan kegiatan yang tertuang didalam RENSTRA DKP Sulteng 2021-2026.

Untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan terlaksana dengan baik sesuai dengan waktu dan sasarannya maka telah disepakati Perjanjian Kinerja antara Gubernur dan Pejabat Eselon II dalam hal ini Kepala DKP Sulteng. Kemudian pelaksanaan capaian kinerja DKP

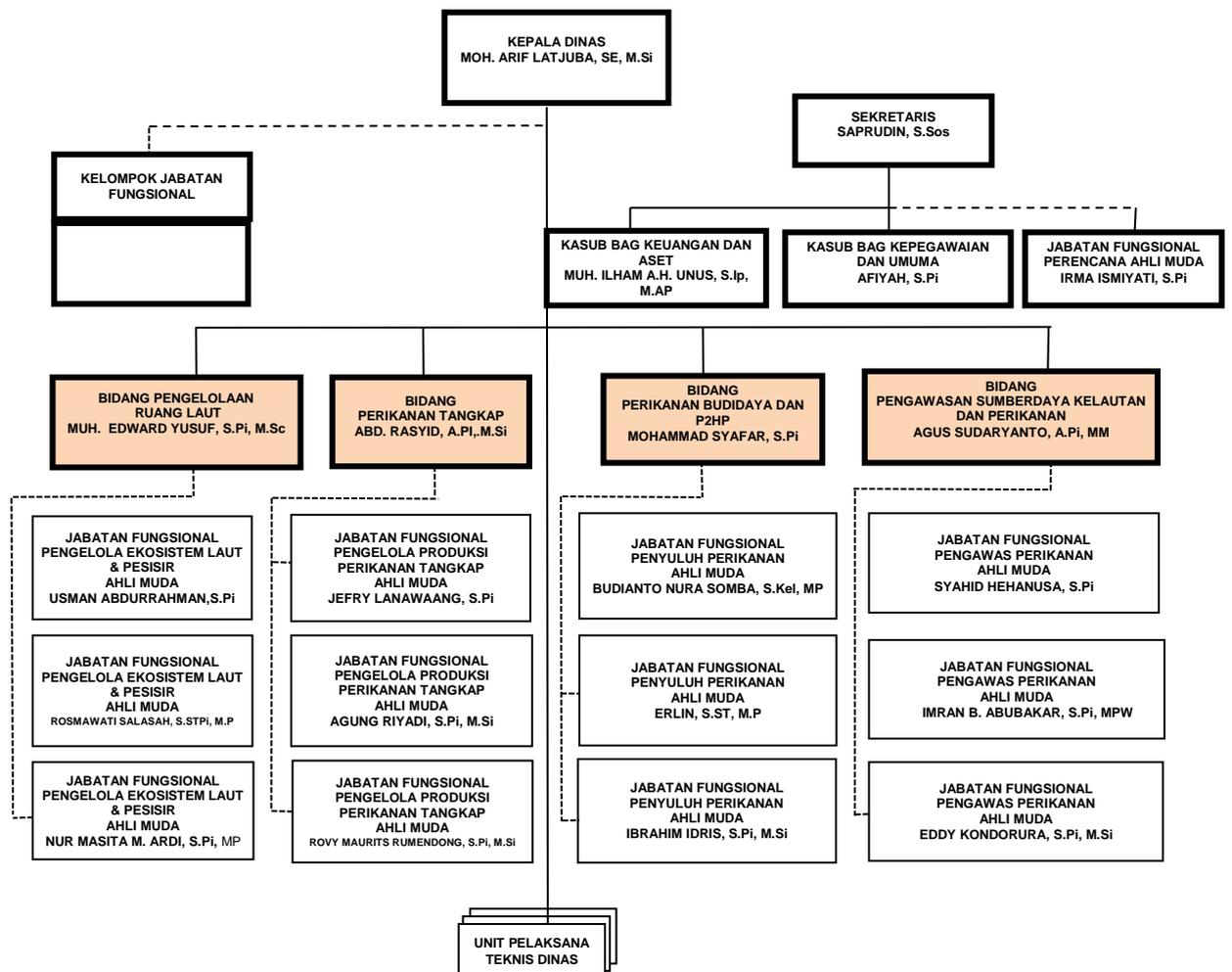
Sulteng dilaporkan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) setiap tahunnya dengan cara pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Cascading kinerja DKP Sulteng dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Cascading DKP Sulteng

**1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pada tahun 2016 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas. Berikut Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.



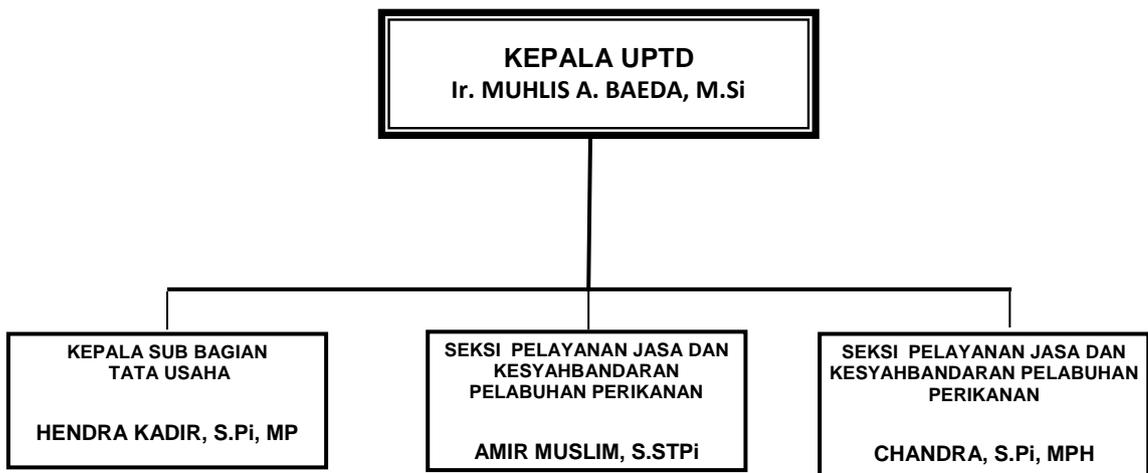
Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi DKP Provinsi Sulawesi Tengah



Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Perbenihan Perikanan



Gambar 4. Struktur Organisasi UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP)



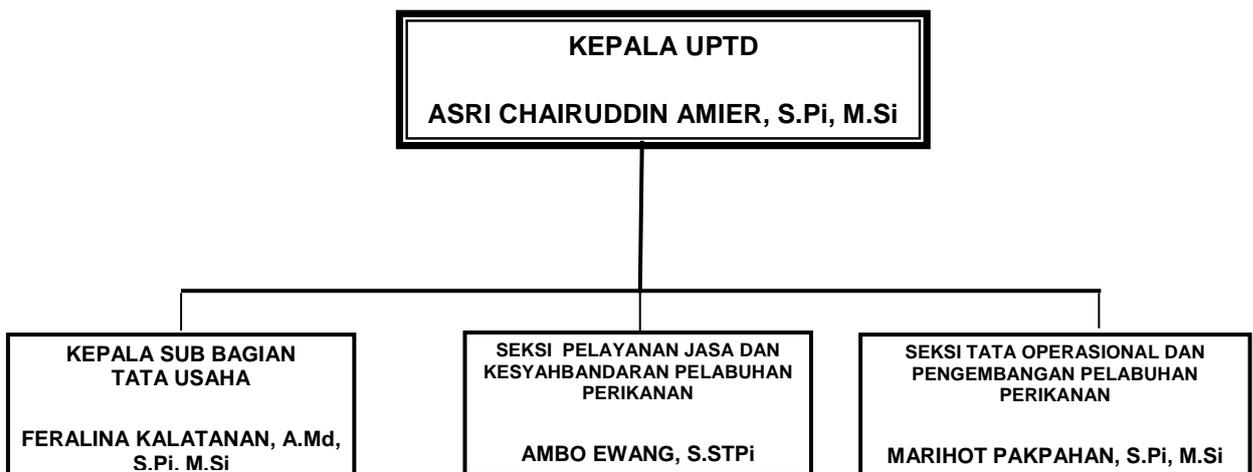
Gambar 5. Struktur Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I



Gambar 6. Struktur Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II

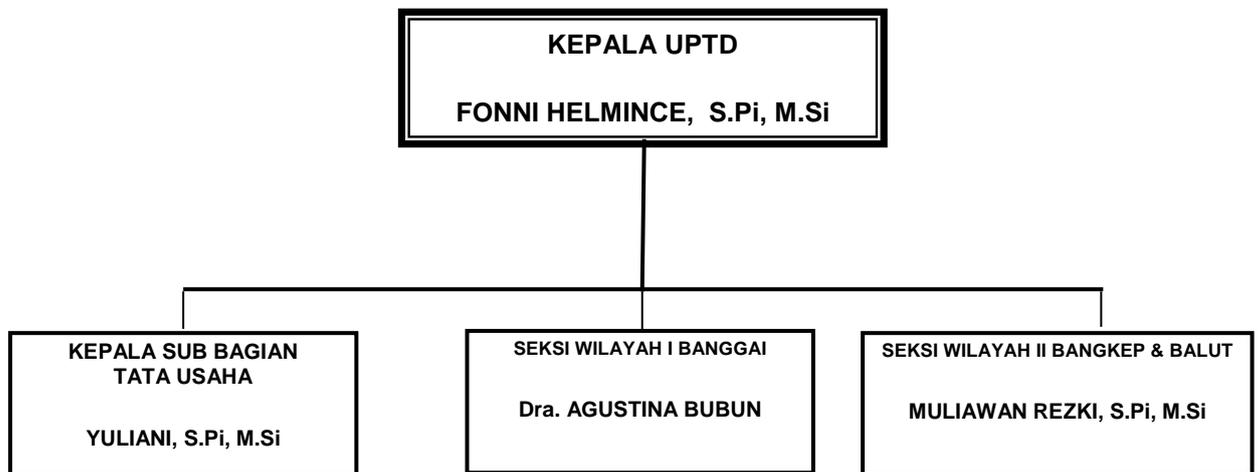


Gambar 7. Struktur Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III



Gambar 8. Struktur Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah IV

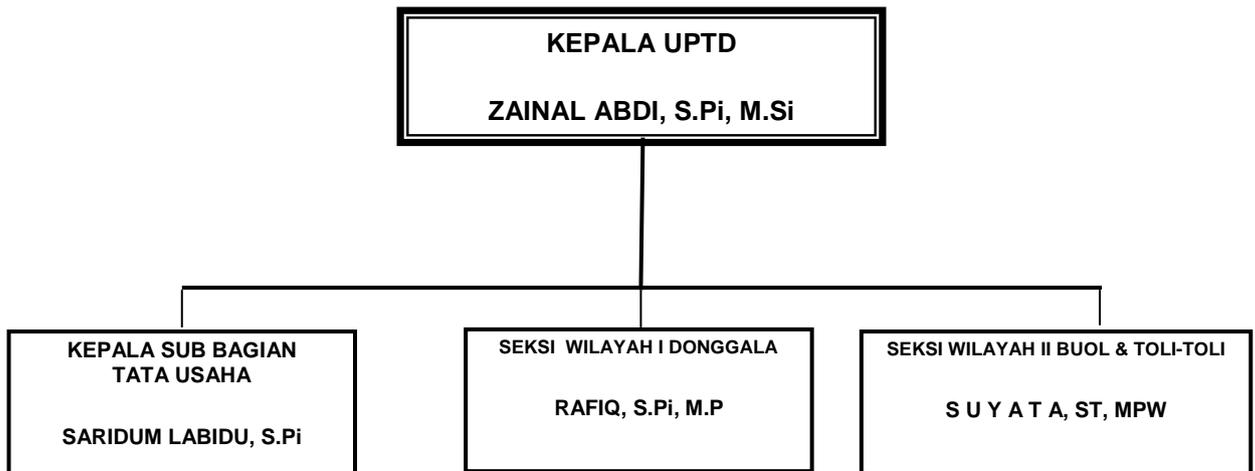
Pada tahun 2020 sesuai Peraturan Gubernur nomor 20 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas dibentuk 4 (empat) UPT baru lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Doboto; UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Morowali; UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Teluk Tomini; dan UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Banggai.



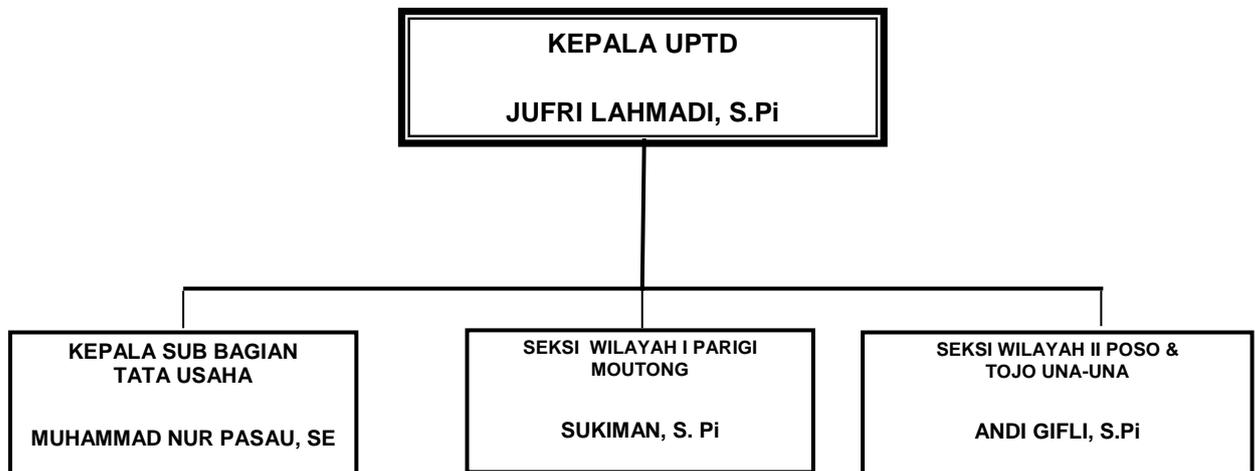
Gambar 9. Struktur Organisasi UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banggai



Gambar 10. Struktur Organisasi UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Morowali



Gambar 11. Struktur Organisasi UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Donggala, Buol dan Toli-toli



Gambar 12. Struktur Organisasi UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Teluk Tomini

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan bidang kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah berpedoman kepada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi; Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas perikanan bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Rincian tugas pokok dan fungsi sekretariat, masing-masing bidang, sub bidang, seksi, kelompok jabatan fungsional dan UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

#### **Sekretariat**

##### **Tugas :**

Melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, asset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.

##### **Fungsi :**

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, asset, kepegawaian dan umum;
2. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, asset, kepegawaian dan umum;

3. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
4. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
5. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
6. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait sesuai tugas dan fungsinya.

#### **✚ Sub Bagian Program**

Bertugas melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data dan identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

#### **Uraian Tugas :**

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
2. Melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan
3. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit kerja terkait;
4. Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
5. Melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;

6. Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
7. Melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
8. Melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD, RPJMD dan Renstra di lingkungan dinas;
9. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Dinas.

#### **✚ Sub Bagian Keuangan dan Asset**

Bertugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan asset.

##### **Uraian Tugas :**

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian keuangan dan asset;
2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Pengelolaan keuangan dan asset;
3. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan asset dengan pihak dan unit kerja terkait;
4. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan asset;
5. Melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan asset; Melaksanakan pengelolaan atas usaha keuangan, asset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;

6. Melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
7. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
8. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan asset;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
10. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan aset.

#### **✚ Sub bagian Kepegawaian dan Umum**

Bertugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.

##### **Uraian Tugas :**

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
3. Melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
4. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
5. Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
6. Melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;

7. Melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
8. Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
9. Kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor; melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

#### **🚧 Bidang Pengelolaan Ruang Laut**

##### **Tugas :**

Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut.

##### **Fungsi :**

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang laut dan Konservasi Ruang Laut;
3. Penyiapan bahan pengkoordinasian bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan

Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut dengan pihak dan unit terkait;

4. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut;
5. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut;
6. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas bidang pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
8. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Ruang Laut.

#### **Seksi Pemberdayaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil**

Bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

##### **Uraian Tugas :**

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil;
2. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

3. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dengan pihak dan unit terkait;
4. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil;
5. Melaksanakan penyiapan rancangan dokumen Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, dokumen Rencana Aksi dan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk pemanfaatan wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
6. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
7. Melakukan penyusunan data statistik kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
8. Melaksanakan publikasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
9. Melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas seksi Pemberdayaan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

#### **Seksi Pemanfaatan Ruang Laut**

Bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

**Uraian Tugas :**

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pemanfaatan Ruang Laut;
2. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Seksi Pemanfaatan Ruang Laut;
3. Melaksanakan koordinasi kegiatan teknis Pemanfaatan Ruang Laut dengan pihak dan unit terkait;
4. Melaksanakan bimbingan teknis kegiatan pemanfaatan dan pengendalian tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, serta jasa kelautan dan kemaritiman;
5. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana pemanfaatan ruang laut;
6. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi perizinan pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
7. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi perizinan lokasi wisata bahari perizinan lokasi pemanfaatan air laut selain energy di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
8. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi perizinan lokasi reklamasi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut serta pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam;
9. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemanfaatan Ruang Laut.

**✚ Seksi Konservasi Ruang Laut**

Bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan teknis operasional kegiatan Konservasi.

**Uraian Tugas :**

1. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Konservasi;
2. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di seksi Konservasi Ruang Laut;
3. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan teknis kegiatan Konservasi Ruang Laut;
4. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana konservasi ruang laut;
5. Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pencadangan kawasan Konservasi Ruang Laut;
6. Melaksanakan penyiapan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan Konservasi Ruang Laut;
7. Melaksanakan penyiapan penataan batas dan pengelolaan kawasan Konservasi Ruang Laut;
8. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis mitigasi bencana, konservasi kawasan dan jenis ikan serta pencemaran lingkungan Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil;
9. Melakukan monitoring dan evaluasi pada kawasan konservasi laut daerah, kawasan konservasi perairan dan daerah perlindungan laut;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Konservasi Ruang Laut.

**🚧 Bidang Perikanan Tangkap****Tugas :**

Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan fungsi Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap.

**Fungsi :**

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
3. Penyiapan bahan pengkoordinasian bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap dengan pihak dan unit terkait;
4. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
5. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
6. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas Teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;

7. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan;
8. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perikanan Tangkap.

#### **🚧 Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan**

Bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

##### **Uraian Tugas :**

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
2. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
3. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis pengawasan dan pemantauan teknis Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan pihak dan unit terkait;
4. Melakukan pembinaan/bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
5. Melaksanakan survey pengumpulan data dan informasi terhadap melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana sumberdaya ikan;
6. Melaksanakan penyiapan dokumen pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut kewenangan Provinsi;
7. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian usaha penangkapan ikan di wilayah laut kewenangan Provinsi;

8. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa serta penyajian data statistik perikanan tangkap;
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

#### **✚ Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap**

Bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pemantauan, pengawasan dan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap.

##### **Uraian Tugas :**

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap;
2. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap;
3. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis pengawasan dan pemantauan teknis Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dengan pihak dan unit terkait;
4. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan peningkatan Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap;
5. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan Sarana Prasarana Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap;
6. Melaksanakan sosialisasi dan desiminasi teknologi anjuran dibidang usaha penangkapan ikan;

7. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi Perizinan kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan yang menjadi kewenangan Provinsi;
8. Melaksanakan penyiapan dokumen kepemilikan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang menjadi kewenangan Provinsi;
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan pengembangan usaha perikanan tangkap;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap.

#### **✚ Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap**

Bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan bidang Sarana Prasarana Perikanan Tangkap.

##### **Uraian Tugas :**

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
2. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
3. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan teknis Sarana Prasarana Perikanan Tangkap dengan pihak dan unit terkait;

4. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
5. Melaksanakan penyusunan rancangan dan skala prioritas pembangunan dan rehabilitasi Prasarana Perikanan Tangkap;
6. Melaksanakan pembinaan, pemanfaatan dan pengelolaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
7. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi perizinan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
8. Melaksanakan sosialisasi dan desiminasi teknologi anjuran dibidang Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap.

#### **🚧 Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP**

##### **Tugas :**

Membantu kepala dinas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis dalam menyelenggarakan fungsi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya, Logistik Hasil Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

##### **Fungsi :**

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan Usaha Perikanan Budidaya, Logistik Hasil Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan Usaha Perikanan Budidaya, Logistik Hasil Perikanan, pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
3. Penyiapan bahan pengkoordinasian bidang pengembangan Usaha Perikanan Budidaya, Logistik Hasil Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan pihak dan unit terkait;
4. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan Usaha Perikanan Budidaya, Logistik Hasil Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
5. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis bidang pengembangan Usaha Perikanan Budidaya, Logistik Hasil Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
6. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas bidang pengembangan Usaha Budidaya, Logistik Hasil Perikanan, pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
7. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan;
8. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP.

#### **🚧 Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya.**

Bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, fasilitasi, pemberdayaan dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya.

**Uraian Tugas :**

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya;
2. Menghimpun peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya;
3. Melakukan koordinasi dan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dengan pihak dan unit kerja terkait;
4. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana dan potensi kawasan pengembangan Usaha Perikanan Budidaya;
5. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi perizinan Usaha Perikanan Budidaya;
6. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengendalian sistem pembudidayaan ikan yang meliputi benih, pakan, kesehatan ikan dan lingkungan, teknologi dan sistem usaha;
7. Melaksanakan percontohan penerapan teknologi dan pola Usaha Perikanan Budidaya;
8. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa serta penyajian data statistik Perikanan Budidaya;
9. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya.

**✚ Seksi Logistik Hasil Perikanan**

Bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan bidang Logistik Hasil Perikanan.

**Uraian Tugas :**

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Logistik Hasil Perikanan;
2. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Logistik Hasil Perikanan;
3. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis kegiatan Logistik Hasil Perikanan;
4. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana Logistik Hasil Perikanan;
5. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi perizinan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil Pembudidayaan yang menjadi kewenangan provinsi;
6. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengendalian Sistem Logistik Hasil Perikanan;
7. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa serta penyajian data Logistik Hasil Perikanan;
8. Melaksanakan percontohan penerapan teknologi pada pelaku usaha logistik hasil perikanan;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
10. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Logistik Hasil Perikanan.

**✚ Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

Bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta terhadap penyelenggaraan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

**Uraian Tugas :**

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
2. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
3. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis pemberdayaan dan kerjasama pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan pihak dan unit terkait;
4. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
5. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi perizinan dan kelaikan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
6. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengendalian kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
7. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa serta penyajian data statistik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
8. Melaksanakan kegiatan publikasi peningkatan konsumsi dan non konsumsi hasil perikanan;
9. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

11. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

#### **▣ Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

##### **Tugas :**

Membantu kepala dinas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis, dan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap menyelenggarakan fungsi Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Perikanan Budidaya, P2HP, dan Penanganan Pelanggaran.

##### **Fungsi :**

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Perikanan Budidaya, P2HP, dan Penanganan Pelanggaran;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Perikanan Budidaya, P2HP, dan Penanganan Pelanggaran;
3. Penyiapan bahan pengkoordinasian bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Perikanan Budidaya, P2HP, dan Penanganan Pelanggaran dengan pihak dan unit terkait;
4. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Perikanan Budidaya, P2HP, dan Penanganan Pelanggaran;
5. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Perikanan Budidaya, P2HP, dan Penanganan Pelanggaran;

6. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Perikanan Budidaya, P2HP, dan Penanganan Pelanggaran;
7. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan;
8. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan.

#### **✚ Seksi Pengawasan Pengelolaan Ruang laut**

Bertugas melaksanakan, penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut.

##### **Uraian Tugas :**

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja seksi Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut;
2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut;
3. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan teknis kegiatan Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut dengan pihak dan unit terkait;
4. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana Pengawasan Pengelolaan Ruang laut;
5. Melaksanakan publikasi Pencegahan Tindak Pelanggaran Pengelolaan Ruang Laut;
6. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan Pengelolaan Ruang laut;
7. Melaksanakan investigasi tindak pelanggaran pengelolaan ruang laut;

8. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data Pengawasan Pengelolaan Ruang laut;
9. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Seksi Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut.

#### **✚ Seksi Pengawasan Perikanan Budidaya dan P2HP**

Bertugas melaksanakan bahan kebijakan teknis, koordinasi, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Perikanan Budidaya dan P2HP.

##### **Uraian Tugas :**

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengawasan Perikanan Budidaya dan P2HP;
2. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengawasan Perikanan Budidaya dan P2HP;
3. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama kegiatan Pengawasan Perikanan Budidaya dan P2HP;
4. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana Pengawasan Perikanan Budidaya dan P2HP;
5. Melaksanakan publikasi Pencegahan Tindak Pelanggaran Pengelolaan Perikanan Budidaya dan P2HP;
6. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan Pengelolaan Perikanan Budidaya dan P2HP;

7. Melaksanakan investigasi tindak pelanggaran pengelolaan Perikanan Budidaya dan P2HP;
8. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data Pengawasan Perikanan Budidaya dan P2HP;
9. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Seksi Pengawasan Perikanan Budidaya dan P2HP;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Perikanan Budidaya dan P2HP.

#### **✚ Seksi Penanganan Pelanggaran**

Bertugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan penanganan pelanggaran.

##### **Uraian Tugas :**

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Penanganan Pelanggaran;
2. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di seksi Penanganan Pelanggaran;
3. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga terkait dalam rangka Penanganan Pelanggaran dengan pihak dan unit kerja terkait;
4. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana Penanganan Pelanggaran;
5. Melaksanakan penyiapan dokumen penyelidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;

6. Melaksanakan penyelidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
7. Melaksanakan penyiapan dokumen penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
8. Melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
9. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan seksi Penanganan Pelanggaran;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penanganan Pelanggaran.

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diturunkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 42 tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.

#### **Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu

➤ **UPT Balai Perbenihan Perikanan,**

Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Perikanan yang selanjutnya disebut UPT Balai Perbenihan Perikanan adalah unsur pelaksanaan operasional teknis perbenihan perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. Urusan yang menjadi kewenangan UPT Balai Perbenihan Perikanan yakni menyelenggarakan perbenihan perikanan

**Tugas :**

Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang perbenihan perikanan.

**Fungsi :**

1. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPT Balai Perbenihan Perikanan;
2. Pelaksanaan pelayanan dan pengkajian teknologi di bidang perbenihan dan budidaya perikanan;
3. Pelaksanaan tugas teknis operasional/penunjang Dinas di bidang perbenihan perikanan; dan
4. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana perbenihan perikanan.

**🚦 Kepala UPTD**

Bertugas melakukan pembinaan teknis dan operasional, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan serta merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan di bidang perbenihan ikan air laut dan payau serta perbenihan ikan air tawar.

**Fungsi:**

1. Perumusan kebijakan dan pembinaan teknis operasional atas penyelenggaraan kegiatan perbenihan ikan air laut dan payau serta perbenihan ikan air tawar;

2. Pengendalian dan koordinasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Balai Perbenihan Perikanan;
3. Pembinaan pengelolaan ketatausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **✚ Sub Bagian Tata Usaha**

Bertugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha meliputi penyusunan program, kepegawaian dan umum, keuangan, aset, perlengkapan serta pengelolaan naskah Dinas.

#### **Uraian Tugas :**

1. Melaksanakan penyusunan program Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Balai Perbenihan Perikanan;
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi Sub Bagian Tata Usaha;
3. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana dan prasarana perbenihan perikanan;
4. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPT Balai Perbenihan Perikanan;
5. Melaksanakan publikasi data dan informasi UPT Balai Perbenihan Perikanan;
6. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan aset meliputi penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
7. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan umum meliputi bahan pengusulan mutasi kepegawaian, pembuatan Karpeg, Kartu BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, Diklat, rumah tangga, kebersihan dan keamanan;
8. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dengan unit kerja terkait;

9. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan; dan
11. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Balai Perbenihan Perikanan.

#### **✚ Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar**

Bertugas menyiapkan bahan dan data, Melaksanakan pembinaan operasional, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, Kajian teknologi dan tata laksana produksi serta bimbingan, penerapan teknologi anjuran dibidang Perbenihan dan Budidaya ikan air tawar;

##### **Uraian tugas :**

1. Melaksanakan penyusunan program Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar;
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar;
3. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana perbenihan ikan air tawar;
4. Melaksanakan bimbingan teknis penerapan teknologi anjuran di bidang perbenihan dan budidaya ikan air tawar;
5. Melaksanakan kajian dan penerapan teknologi anjuran di bidang perbenihan ikan air tawar;
6. Melaksanakan pengelolaan induk unggul di bidang perbenihan ikan air tawar;
7. Melaksanakan produksi perbenihan dan pembudidayaan ikan air tawar;
8. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar dengan unit kerja terkait;

9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan tata laksana produksi benih ikan air tawar;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan; dan
11. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar.

#### **✚ Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut**

Bertugas menyiapkan bahan dan data, Melaksanakan pembinaan operasional, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, kajian teknologi dan tata laksana produksi serta bimbingan, penerapan teknologi anjuran di bidang perbenihan dan budidaya ikan air payau dan laut

##### **Uraian tugas :**

1. Melaksanakan penyusunan program Seksi Ikan Air Payau dan Laut;
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut;
3. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana perbenihan ikan air payau dan laut;
4. Melaksanakan kajian teknologi perbenihan dan budidaya ikan air payau dan laut;
5. Melaksanakan bimbingan teknis penerapan teknologi anjuran di bidang perbenihan dan budidaya ikan air payau dan laut;
6. Melaksanakan penerapan teknologi anjuran di bidang perbenihan ikan air payau dan laut;
7. Melaksanakan pengelolaan induk unggul serta produksi perbenihan dan budidaya ikan air payau dan laut;
8. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut dengan unit kerja terkait;

9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan tata laksana produksi benih ikan air payau dan laut;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan; dan
11. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut.

► **UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP)**

Unit Pelaksana Teknis Penerapan Mutu Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Penerapan Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Urusan yang menjadi kewenangan UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan yakni menyelenggarakan penerapan mutu hasil perikanan.

UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas sebagai unsur penunjang sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pembinaan dan pengendalian mutu hasil perikanan.

Untuk Melaksanakan tugas tersebut UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang penerapan mutu hasil perikanan;
2. Pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang penerapan mutu hasil perikanan;
3. Pelaksanaan Pelayanan Tugas teknis administrasi ketatausahaan pada UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan; dan
4. Melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana penerapan mutu hasil perikanan.

**🚧 Kepala UPTD**

Bertugas melakukan pembinaan teknis dan operasional, mengkoordinasi dan melakukan pengawasan serta merumuskan kebijaksanaan penyelenggaraan kegiatan dibidang Penerapan Mutu Hasil Perikanan;

**Fungsi:**

1. Perumusan kebijakan dan pembinaan teknis oprasional atas penyelenggaraan kegiatan di bidang Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
2. Melaksanakan koordinasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan;
3. Melaksanakan Pengelolaan ketatausahaan dan kelompok Jabatan Fungsional.

**🚧 Sub Bagian Tata Usaha**

Bertugas menyiapkan bahan dan data, melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan serta menyelenggarakan kegiatan di bidang ketatausahaan yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, aset dan umum serta pengelolaan naskah Dinas.

**Uraian Tugas :**

1. Melaksanakan penyusunan program;
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi Sub Bagian Tata Usaha;
3. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana penerapan mutu hasil perikanan;
4. memberikanan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
5. Melaksanakan publikasi data dan informasi UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
6. Melaksanakan pengelolaan keuangan, aset dan penyusunan anggaran UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan;

7. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan umum meliputi bahan pengusulan mutasi kepegawaian, pembuatan KARPEG, Kartu BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, Rumah Tangga, Kebersihan dan Keamanan;
8. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dengan unit kerja terkait;
9. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan; dan
11. Melaksanakan penyiapan bahan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan.

#### **✚ Seksi Pengujian Mutu**

Bertugas menyiapkan bahan dan data penyelenggaraan kegiatan pengujian mutu.

##### **Uraian Tugas :**

1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengujian Mutu;
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi, keuangan, aset dan penyusunan anggaran Seksi Pengujian Mutu;
3. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana dan prasarana Seksi Pengujian Mutu;
4. Melaksanakan kajian teknologi pengolahan hasil perikanan;
5. Melaksanakan pembinaan teknis penerapan teknologi produk olahan hasil perikanan;
6. Melaksanakan inovasi desain kemasan produk hasil perikanan;
7. Melaksanakan pelayanan jasa produk olahan hasil perikanan bernilai tambah;
8. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengujian Mutu;

9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan Seksi Pengujian Mutu;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan; dan
11. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengujian Mutu.

#### **Seksi Penerapan Mutu**

Bertugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi kegiatan Seksi Penerapan Mutu.

##### **Uraian tugas:**

1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerapan Mutu;
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi, keuangan, aset dan penyusunan anggaran Seksi Penerapan Mutu;
3. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi sistem jaminan mutu unit pengolahan ikan dan usaha kecil menengah;
4. Melaksanakan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta sertifikasi produk;
5. Melaksanakan monitoring bahan kimia berbahaya pada produk hasil perikanan;
6. Melaksanakan penerapan mutu hasil perikanan, bahan baku dan bahan penolong lainnya;
7. Menyiapkan bahan laporan hasil penerapan mutu produk perikanan;
8. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan penerapan mutu dengan unit kerja terkait;
9. monitoring dan evaluasi hasil kegiatan penerapan mutu;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan; dan

11. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penerapan Mutu.

➤ **UPT PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I, II, III DAN IV**

Keterangan tambahan :

1. Urusan yang menjadi kewenangan UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I yakni menyelenggarakan pengelolaan pelabuhan perikanan wilayah I, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol.
2. Urusan yang menjadi kewenangan UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II yakni menyelenggarakan pengelolaan pelabuhan perikanan wilayah II, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-Una.
3. Urusan yang menjadi kewenangan UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah III yakni menyelenggarakan pengelolaan pelabuhan perikanan wilayah III, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut.
4. Urusan yang menjadi kewenangan UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah IV yakni menyelenggarakan pengelolaan pelabuhan perikanan wilayah IV dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara.

UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I, II, III dan IV mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang pelabuhan perikanan.

**Fungsi :**

1. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I, II, III dan IV;

2. Pelaksanaan pengendalian tata kelola dan pemanfaatan ruang laut dan pelabuhan perikanan di wilayah kerjanya;
3. Pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas dan pemerhati lingkungan di wilayah kerjanya;
4. Pelaksanaan kaji terap teknologi konservasi kelautan berbasis lokalitas wilayah kerjanya;
5. Pelaksanaan tata kelola dan pelayanan usaha serta kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;
6. Pelaksanaan tugas teknis operasional/penunjang Dinas di bidang pelabuhan perikanan; dan
7. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana di bidang pelabuhan perikanan.

#### **Kepala UPTD**

Bertugas melaksanakan pembinaan teknis dan operasional, mengkoordinasikan, Melaksanakan pengawasan dan merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan di bidang kelautan dan tata operasional pelabuhan perikanan

#### **Fungsi:**

1. Perumusan kebijakan dan pembinaan teknis operasional atas penyelenggaraan kegiatan di bidang kelautan dan tata operasional pelabuhan perikanan;
2. Pengendalian dan koordinasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I, II, III dan IV;
3. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan sarana dan prasarana serta pengendalian lingkungan;
4. Pelaksanaan pelayanan jasa, fasilitasi usaha, pemberdayaan masyarakat perikanan, koordinasi peningkatan produksi dan pemasaran hasil perikanan;

5. Pengelolaan dan peningkatan sumber daya manusia, ketatausahaan, urusan rumah tangga serta Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Pelaksanaan kaji terap teknologi konservasi kelautan berbasis lokalitas; dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **✚ Sub Bagian Tata Usaha**

Bertugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan perlengkapan aset dan umum serta pengelolaan naskah Dinas.

#### **Uraian Tugas :**

1. Melaksanakan program;
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I, II, III dan IV;
3. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
4. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I, II, III dan IV;
5. Melaksanakan publikasi data dan informasi UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I, II, III dan IV;
6. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan aset meliputi penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
7. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan umum meliputi bahan pengusulan mutasi kepegawaian, pembuatan karpeg, kartu BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, Diklat, rumah tangga, kebersihan dan keamanan;
8. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dengan unit kerja terkait;

9. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan; dan
11. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I, II, III dan IV.

#### **✚ Seksi Tata Operasional dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan**

Bertugas Melaksanakan pelayanan teknis operasional pelabuhan dan pengembangan pelabuhan perikanan.

##### **Uraian Tugas :**

1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Tata Operasional dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan;
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi Seksi Tata Operasional dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan;
3. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana pelabuhan perikanan;
4. Melaksanakan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
5. Melaksanakan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan, keberangkatan kapal perikanan serta surat persetujuan berlayar;
6. Melaksanakan inspeksi pembongkaran ikan, pemeriksaan dokumen aktifitas penangkapan ikan, dan pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak di pelabuhan perikanan;
7. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa serta penyajian dan publikasi data produksi pendaratan ikan di pelabuhan perikanan;

8. Melaksanakan kegiatan tata kelola dan pelayanan usaha di bidang kepelabuhanan perikanan;
9. melakukan monitoring dan evaluasi serta bimbingan teknis kegiatan operasional dan pengembangan pelabuhan perikanan;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan; dan
11. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Tata Operasional dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan.

#### **✚ Seksi Pelayanan Jasa dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan**

Bertugas Melaksanakan pelayanan teknis operasional pelabuhan dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan.

##### **Uraian Tugas :**

1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Jasa dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan;
2. Melaksanakan pengelolaan Administrasi Seksi Pelayanan Jasa dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan;
3. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi sarana prasarana dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
4. Melaksanakan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
5. Melaksanakan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan, keberangkatan kapal perikanan serta surat persetujuan berlayar;
6. Melaksanakan inspeksi pembongkaran ikan, pemeriksaan dokumen aktifitas penangkapan ikan dan pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak di pelabuhan perikanan;
7. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa serta penyajian dan publikasi data produksi pendaratan ikan di pelabuhan perikanan;

8. Melaksanakan kegiatan tata kelola dan pelayanan usaha di bidang kepelabuhanan perikanan;
9. melakukan monitoring dan evaluasi serta bimbingan teknis kegiatan operasional pelabuhan dan kesyahbandaran perikanan;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan; dan
11. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Jasa dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan.

➤ **UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Wilayah Doboto, Wilayah Morowali, Wilayah Teluk Tomini dan Wilayah Banggai**

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut UPT Kawasan KP3K adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Urusan yang menjadi kewenangan UPT Kawasan KP3K yakni menyelenggarakan kegiatan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil pada kawasan yang telah ditetapkan.

**Tugas :**

Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil

**Fungsi :**

1. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPT kawasan KP3K;
2. Pelaksanaan pelayanan dan pengkajian teknologi di bidang konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. Pelaksanaan tugas teknis operasional/penunjang Dinas di bidang konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

4. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.

#### **Kepala UPTD**

Bertugas melakukan pembinaan teknis dan operasional, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan serta merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan di bidang konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil pada wilayah kewenangannya.

##### **Fungsi:**

1. Perumusan kebijakan dan pembinaan teknis operasional atas penyelenggaraan kegiatan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Pengendalian dan koordinasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Pembinaan pengelolaan ketatausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **Kepala Sub bagian Tata Usaha**

Bertugas menyiapkan bahan dan data, melakukan pembinaan operasional mengkoordinasikan serta menyelenggarakan kegiatan dibidang ketatausahaan yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, asset dan umum serta pengelolaan naskah dinas.

##### **Uraian tugas :**

1. Melaksanakan penyusunan program;
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi sub bagian tata usaha;
3. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan

- sarana dan prasarana kawasan satu dan kawasan dua;
4. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  5. Melaksanakan publikasi data dan informasi UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  6. Melaksanakan pengelolaan keuangan, asset dan penyusunan anggaran UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  7. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan umum meliputi bahan pengusulan mutasi kepegawaian, pembuatan karpeg, kartu BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, urusan rumah tangga UPT, kebersihan dan keamanan;
  8. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas kegiatan Sub bagian tata usaha dengan unit terkait;
  9. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub bagian tata usaha
  10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan;
  11. Melaksanakan penyiapan bahan data, menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Sub bagian tata usaha dan UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

#### **Kepala Seksi Wilayah I**

Bertugas menyiapkan bahan dan data penyelenggaraan kegiatan Wilayah I.

##### **Uraian tugas :**

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja seksi Wilayah I;
2. Menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Seksi Wilayah I
3. Melakukan koordinasi teknis pelaksanaan pelayanan perijinan di kawasan konservasi wilayah I

4. Melaksanakan Bimbingan, Pembinaan, dan pengembangan kegiatan konservasi Wilayah I.
5. Melaksanakan rehabilitasi ekosistem terumbu karang, Padang Lamun dan Mangrove pada wilayah I
6. Melaksanakan perlindungan dan penangkaran terhadap ikan dan ataupun biota perairan yang langka, endemic, terancam punah, dan/atau dilindungi pada wilayah I
7. Melaksanakan kegiatan pencadangan kawasan konservasi wilayah I
8. Melaksanakan peyiapan dan pengolahan data statistic ekosistim terumbu karang, padang lamun, mangrove serta jenis dan jumlah biota, kawasan ekowisata bahari serta sumber ekonomi alternative diarea pengelolaan konservasi, serta penyusunan data series kawasan Wilayah I
9. Melaksanakan identifikasi, monitoring, pembinaan dan evaluasi kawasan konservasi wilayah I
10. Melaksanan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
11. Melaksanakan penyiapan bahan dan data menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi Wilayah

#### **Kepala Seksi Wilayah II**

Bertugas menyiapkan bahan dan data penyelenggaraan kegiatan Wilayah II.

##### **Uraian tugas :**

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja seksi Wilayah II;
2. Menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Seksi Wilayah II;
3. Melakukan koordinasi teknis pelaksanaan pelayanan perijinan di kawasan konservasi wilayah II;
4. Melaksanakan Bimbingan, Pembinaan, dan pengembangan

- kegiatan konservasi Wilayah II;
5. Melaksanakan rehabilitasi ekosistem terumbu karang, Padang Lamun dan Mangrove pada wilayah II;
  6. Melaksanakan perlindungan dan penangkaran terhadap ikan dan ataupun biota perairan yang langka, endemic, terancam punah, dan/atau dilindungi pada wilayah II;
  7. Melaksanakan kegiatan pencadangan kawasan konservasi wilayah II;
  8. Melaksanakan peyiapan dan pengolahan data statistic ekosistem terumbu karang, padang lamun, mangrove serta jenis dan jumlah biota, kawasan ekowisata bahari serta sumber ekonomi alternative diarea pengelolaan konservasi, serta penyusunan data series kawasan Wilayah II;
  9. Melaksanakan identifikasi, monitoring, pembinaan dan evaluasi kawasan konservasi wilayah II;
  10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
  11. Melaksanakan penyiapan bahan dan data menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi Wilayah II;

### 1.3 ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan tugas dan fungsi, dalam pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, yakni:

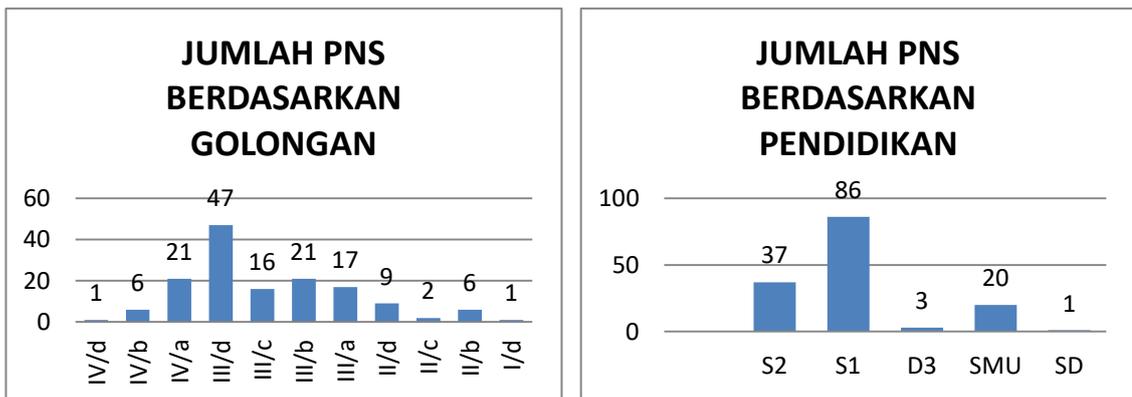
1. Kualitas SDM pelaku usaha yang relatif rendah;
2. Kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang belum optimal;
3. Belum optimalnya sarana prasarana serta infrastruktur pendukung produksi;
4. Masih didominasi oleh perikanan skala kecil/teknologi sederhana;
5. Transformasi teknologi serta inovasi yang belum berjalan baik;

6. Sulitnya akses terhadap induk, benih dan pakan murah berkualitas;
7. Keterbatasan BBM bersubsidi dan es;
8. Tingginya biaya operasional dibandingkan pendapatan;
9. System pendapatan dan informasi yang belum terintegrasi;
10. Konflik kepentingan dengan pengguna lain;
11. Masih terbatasnya luasan tambak garam terintegrasi dan masih bersifat tradisional;
12. Mayoritas pelaku usaha belum memiliki jaminan usaha;
13. Penanganan pasca panen dan penanganan ikan dikapal yang masih konvensional;
14. Keterbatasan sarana prasarana logistik dan pengolahan;
15. Kurang optimalnya fungsi kelembagaan pelaku usaha;
16. Masih maraknya IUU fishing;
17. Sistem perijinan belum efektif dan efisien;
18. Mahalnya biaya operasi pengawasan;
19. Kurangnya sarana prasarana penegakan hukum;
20. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP berkelanjutan;
21. Infrastruktur dasar serta sarana prasarana terutama di pulau-pulau kecil baik bagi aparaturnya maupun masyarakat yang masih terbatas;
22. Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir (abrasi, mangrove, lamun, terumbu karang);
23. Upaya rehabilitasi dan laju kerusakan kawasan pesisir dan laut tidak seimbang;
24. Ketersediaan dokumen review RZWP3K;
25. Masih ada pelaksanaan kerja yang belum memiliki SOP/instruksi kerja serta manajemen resiko;
26. Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan SDKP;

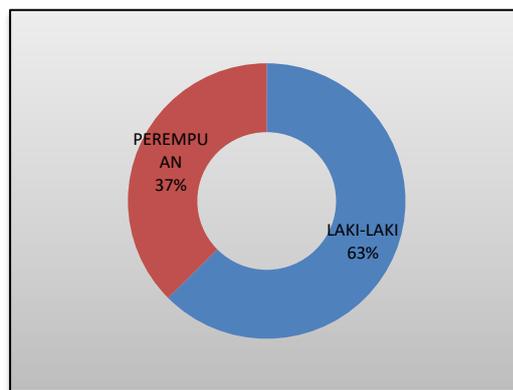
27. Keterbatasan sarana prasarana aparatur terutama pada unit-unit pelaksana teknis.

**1.4 DUKUNGAN SDM DAN SARANA PRASARANA**

Guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan perikanan dan kelautan, maka DKP Sulteng pada tahun 2023 didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 147 orang personel, menurun dari tahun 2022 yang berjumlah 149 orang. Penurunan ini disebabkan adanya pegawai yang pensiun. Berikut grafik penggolongan karyawan DKP Sulteng berdasarkan golongan/ruang dan pendidikan serta struktur organisasi DKP Sulteng, sebagai berikut:



Gambar 13. Jumlah ASN berdasarkan golongan/ruang dan pendidikan



Gambar 14. Jumlah ASN berdasarkan Gender

Dari seluruh karyawan DKP Sulteng terdapat 92 orang laki-laki atau sebesar 63% dan 55 orang perempuan atau sebesar 37%. Pegawai DKP sulteng didominasi oleh golongan III yakni sebanyak 101 orang dan diikuti golongan IV sebanyak 28 orang lalu golongan II sebanyak 17 orang dan yang terakhir golongan I sebanyak 1 orang. Hal ini dapat memberikan gambaran bahwa DKP Sulteng terdiri dari mayoritas pegawai yang berkualitas dengan pendidikan minimal setingkat strata satu (S1).

Guna Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya selain Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana penunjang mutlak diperlukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan didalam mengemban tugas dan fungsinya agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien. Adapun daftar Inventaris/sarana dan prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Aset Tetap Per 31 Desember 2022

No	Uraian	Nilai (Rp.)	Keterangan
1	Tanah	35.217.773.080,00	Bahwa asset tersebut berada pada kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Jl. Undata No. 7 Palu dan UPTD Lingkup DKP Sulteng
2	Peralatan dan Mesin	53.500.365.403,00	
3	Gedung dan Bangunan	73.362.029.908,66	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	47.681.845.046,00	
5	Aset tetap lainnya	1.139.821.321,00	
6	Konstruksi dalam pengerjaan	674.457.500,00	
7	Akumulasi penyusutan	(54.042.762.995,00)	
JUMLAH		157.533.529.263,66	

Sumber : Subbagian Keuangan dan Asset Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah (2022)

### 1.5 TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2022

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk

mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja.

Penilaian terhadap implementasi SAKIP dilakukan oleh Inspektorat. Tahun 2022 penilaian SAKIP DKP Sulteng diperoleh nilai 83,80 dari nilai maksimum 100 atau mendapat predikat A (interpretasi memuaskan). Adapun rincian komponen perhitungannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022

Rekomendasi LHE	Tindak Lanjut
<p><b>Perencanaan Kinerja:</b></p> <p>1) Anggaran yang ditetapkan seharusnya mengacu pada kinerja yang ingin dicapai;</p> <p>2) target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja seharusnya menggambarkan kinerja dapat dicapai (Achievable), menantang dan realistis;</p>	<p>1) Dalam penetapan anggaran selanjutnya untuk menjadikan target kinerja sebagai acuan;</p> <p>2) dalam menyusun target perencanaan kinerja selanjutnya, lebih menggambarkan kinerja yang dapat dicapai, menantang dan realistis</p>

<p><b>Pengukuran Kinerja:</b></p> <p>1) menyusun SOP atau dokumen lainnya yang disamakan tentang teknis pengumpulan data kinerja;</p> <p>2) data kinerja yang dikumpulkan belum seluruhnya relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan;</p> <p>3) belum setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja untuk dibawahnya secara berjenjang;</p> <p>4) belum setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja;</p>	<p>1) menyusun SOP pengumpulan data kinerja;</p> <p>2) untuk selanjutnya menyiapkan data kinerja yang relevan dalam pengukuran capaian kinerja;</p> <p>3) setiap level organisasi di DKP akan melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja untuk dibawahnya secara berjenjang;</p> <p>4) mensosialisasikan kepada seluruh pegawai mengenai hasil pengukuran kinerja;</p>
<p><b>Pelaporan Kinerja:</b></p> <p>1) laporan kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dan keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi;</p> <p>2) dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya direview dan hasilnya didistribusikan secara internal;</p> <p>3) penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai;</p> <p>4) penyusunan realisasi kinerja berdasarkan data pendukung atas validasi kinerja.</p>	<p>1) Dalam penyusunan laporan berikutnya menyajikan informasi analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dan keuangan yang berkaitan dengan pencapaian sasaran kinerja instansi;</p> <p>2) Melakukan review pada laporan kinerja dan mendistribusikan hasilnya secara internal;</p> <p>3) mensosialisasikan kepada seluruh pegawai mengenai hasil pengukuran kinerja agar menjadi kepedulian dari seluruh pegawai;</p> <p>4) menyusun realisasi kinerja berdasarkan data pendukung atas validasi kinerja</p> <p>5) menindaklanjuti hasil evaluasi program dalam rangka perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.</p>

Uraian hasil penilaian terhadap masing-masing komponen yang dinilai adalah sebagai berikut:

- **Perencanaan Kinerja**, untuk komponen ini anggaran yang ditetapkan belum sepenuhnya mengacu pada kinerja yang ingin dicapai.

- **Pengukuran Kinerja**, untuk sub komponen *Pemenuhan Pengukuran*, belum tersedia SOP atau dokumen lainnya yang disamakan tentang pengumpulan data kinerja. Pada sub komponen *Kualitas Pengukuran*, data kinerja yang dikumpulkan belum seluruhnya relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan dan belum setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja untuk dibawahnya secara berjenjang. Pada sub komponen *Pemanfaatan Pengukuran*, pengukuran kinerja belum dimanfaatkan dalam pemberian reward dan punishment, dan belum setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

- **Pelaporan Kinerja**, untuk sub komponen *Pemenuhan Informasi Kinerja*, dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya direview dan hasilnya didistribusikan secara internal, pada sub komponen *Pemanfaatan Informasi Kinerja*, penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai, dan tidak ada bukti bahwa informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kerja organisasi.

Rencana aksi untuk meningkatkan Nilai SAKIP pada tahun 2023, yaitu: (1) penetapan anggaran mengacu pada kinerja yang ingin dicapai; (2) penetapan target dalam perencanaan kinerja harus menggambarkan kinerja yang dapat dicapai, menantang dan realistis; (3) menyusun SOP atau dokumen lainnya yang disamakan mengenai pengumpulan data kinerja; (4) setiap level organisasi di DKP harus melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja untuk dibawahnya secara berjenjang; (5) menggunakan

pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian reward dan punishment pegawai; (6) mensosialisasikan kepada seluruh pegawai mengenai hasil pengukuran kinerja; (5) mereview laporan kinerja serta mendistribusikan hasilnya secara internal agar menjadi kepedulian bagi seluruh pegawai; dan (6) menindaklanjuti hasil evaluasi program dalam rangka perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Tujuan pencapaian jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah adalah: Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan (*triple bottom line*).

Adapun definisi operasional tujuan diatas adalah:

- 1) Sejahtera secara ekonomi, melalui:
  - a) Peningkatan jumlah produksi kelautan dan perikanan melalui pendekatan agribisnis;
  - b) Peningkatan inovasi teknologi berkelanjutan dan infrastruktur bidang kelautan dan perikanan; dan
  - c) Peningkatan ketahanan dan keamanan pangan produksi kelautan dan perikanan.
- 2) Sejahtera secara sosial, melalui:
  - a) Peningkatan SDM Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan; dan
  - b) Peningkatan SDM ASN Kelautan dan Perikanan.
- 3) Sejahtera secara lingkungan, melalui:
  - a) Peningkatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan; dan
  - b) Peningkatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Adapula sasaran yang hendak dicapai yakni:

1. Terselenggaranya peningkatan kapasitas dan kinerja ASN bidang kelautan dan perikanan;
2. Terselenggaranya peningkatan kualitas SDM Pelaku Usaha Perikanan;
3. Terselenggaranya regulasi-deregulasi untuk peningkatan dan pengelolaan produksi serta kegiatan konservasi;

4. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan;
5. Terwujudnya ketahanan pangan bidang kelautan dan perikanan di Sulawesi Tengah;
6. Terwujudnya pengelolaan dan peningkatan produksi kelautan dan perikanan;
7. Tersedianya teknologi berkelanjutan untuk peningkatan dan pengelolaan produksi;
8. Tersedianya infrastruktur untuk peningkatan dan pengelolaan produksi;
9. Terselenggaranya kemudahan akses pembiayaan dan pemasaran pelaku usaha;
10. Terwujudnya peningkatan konservasi kelautan dan perikanan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada berikut.

Tabel 3. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah DKP Sulteng

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Peningkatan PDRB dan Penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin Kelautan dan Perikanan Berbasis Pengelolaan Sdkp yang Berkeadilan dan Berkelanjutan		Kontribusi PDRB Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB Sulawesi Tengah	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6
			Penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin Kelautan dan Perikanan (%)		2	3	4	6	8
		Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Perikanan	99	100	100.8	101,6	102.5	103,4
		Terwujudnya pengelolaan Sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	18.49	19.14	19.98	20.95	21.85	22,55
		peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	Produksi Perikanan (ton)	1.473.544,00	1.491.033,02	972.693,75	1.013.199,14	1.569.932,33	1.596.764,28
			Angka Konsumsi Ikan (Kg/kapita/tahun)	53,83	55,39	57,05	58,77	60,53	62,35
		Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan serta regulasi-deregulasi terkait pengelolaan SDKP	Jumlah Hari Operasi Pengawasan SDKP (Hari Operasi)	150	200	250	300	350	400

## 2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktifitas dalam kurun waktu tertentu atau suatu cara untuk mencapai visi misi yang telah dirumuskan. Strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan produksi dan produktifitas;
  - a) Peningkatan produksi dan produktifitas perikanan budidaya.
  - b) Peningkatan Produksi dan produktifitas perikanan tangkap.
- 2) Pengembangan Agribisnis;
  - a) Peningkatan Pengolahan Hasil perikanan
  - b) Menjaga kualitas produk melalui keamanan pangan
- 3) Peningkatan kualitas lingkungan
  - a) Tata kelola dan pemanfaatan ruang laut
  - b) Rehabilitasi dan konservasi wilayah laut dan pesisir dan pulau-pulau kecil
  - c) Mitigasi bencana
  - d) Pengawasan SDKP Terintegrasi
- 4) Peningkatan kapasitas SDM dan kualitas pelayanan;
  - a) Peningkatan SDM ASN kelautan dan perikanan.

Dalam mendefinsikan tujuan kesejahteraan secara Ekonomi, Sosial dan Lingkungan kedalam metode *Balanced Score Card* (BSC) yang dibagi menjadi 4 (empat) perspektif yaitu: *Stakeholders Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective* dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Stakeholders Perspektif, yang dijabarkan dalam tujuan sejahtera ekonomi yaitu (1) *Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan (SS 1)* dengan indikator kinerja (a) Nilai Tukar Perikanan
- 2) Customer Perspektif, yang dijabarkan dalam tujuan sejahtera lingkungan (2) *Terwujudnya pengelolaan Sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan (SS 2)* dengan indikator

kinerja: (b) Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial

- 3) Internal Proses Perspektif, dalam rangka mendukung ketahanan pangan, dijabarkan sebagai (3) *peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing (SS 3)* dengan indikator kinerja : (c) Produksi Perikanan (ton) dan (d) Konsumsi Makan Ikan (Kg/kap/th) serta (4) Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan serta regulasi-deregulasi terkait pengelolaan SDKP (SS4) ; dengan indikator (e) Jumlah hari pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- 4) *Learning and Growth Perspective*, Sejahtera secara Sosial dijabarkan dalam (5) Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (SS 5) dengan indikator : (f) Capaian SAKIP.

Berikut sasaran strategis diatas terangkum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Perikanan	99	100	100,8	101,6	102,5	103,4
Terwujudnya pengelolaan Sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	18,49	19,14	19,98	20,95	21,85	22,55
Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	Produksi Perikanan (ton)	1.473.544,00	1.491.033,02	972.693,75	1.013.199,14	1.569.932,33	1.596.764,28
	Angka Konsumsi Ikan (kg/perkapita/tahun)	53,83	55,39	57,05	58,77	60,53	62,35
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan serta regulasi-deregulasi terkait pengelolaan SDKP	Jumlah Hari Operasi Pengawasan SDKP (hari Operasi)	150	200	250	300	350	400
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik	Capaian SAKIP	75	77	79	81	83	85

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2021-2026 ditetapkan dengan memperhatikan 3 (tiga) dimensi yaitu: (1) maju dan sejahtera secara ekonomi; (2) maju dan sejahtera secara sosial; dan (3) maju dan sejahtera secara lingkungan. Dengan memperhatikan ketiga dimensi diatas maka secara umum disusun arah kebijakan sebagai berikut:

- a) pendidikan dan pelatihan kerja bagi ASN;
- b) penerapan standar pelayanan berbasis SOP;
- c) peningkatan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- d) peningkatan upaya perlindungan pelaku usaha perikanan;
- e) penyediaan inovasi teknologi guna peningkatan kualitas, kuantitas dan keberlanjutan produk kelautan dan perikanan;
- f) Penataan ruang dan konservasi Sumber Daya Hayati Laut (SDHL); dan  
Peningkatan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Tabel 5. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<b>Visi</b>	<b>: Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju</b>		
<b>Misi 3</b>	<b>: Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Peningkatan PDRB dan Penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin Kelautan dan Perikanan Berbasis Pengelolaan SDKP yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	<p>Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan</p> <p>Meningkatnya perekonomian kelautan dan perikanan</p> <p>Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing</p> <p>Terwujudnya pengelolaan Sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan</p> <p>Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan serta regulasi-deregulasi terkait pengelolaan SDKP</p>	<p>Peningkatan produksi dan produktifitas produk kelautan dan perikanan</p> <p>Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan</p> <p>Menjaga kualitas produk melalui keamanan pangan</p> <p>Tata kelola dan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan PPK</p> <p>Rehabilitasi dan konservasi wilayah laut dan pesisir dan PPK</p> <p>Mitigasi bencana</p> <p>Pengawasan SDKP Terintegrasi</p>	<p>Penyediaan inovasi teknologi guna peningkatan kualitas, kuantitas dan keberlanjutan produk kelautan dan perikanan</p> <p>Peningkatan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan</p> <p>Peningkatan upaya perlindungan pelaku usaha perikanan</p> <p>Penataan ruang dan konservasi Sumber Daya Hayati Laut (SDHL) diantaranya melalui perbaikan regulasi; dan</p> <p>Peningkatan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.</p>

### 2.3 STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah bertujuan: (1) peningkatan kapasitas sumber daya manusia (2) peningkatan kontribusi bidang Kelautan dan Perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan pengurangan angka kemiskinan (3) peningkatan hasil produksi dan jumlah pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan serta pemenuhan gizi untuk mencerdaskan masyarakat, dan peningkatan kualitas serta pengawasan sumber daya alam yang mensinergi serta mensinkronisasi arah perencanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah.

Rencana program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 juga disusun dalam rangka pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tengah dengan basis data P3KE (Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim). Jumlah penduduk miskin Sulawesi Tengah subsektor kelautan dan perikanan berdasarkan data P3KE berjumlah 26.927 Kepala Keluarga (KK) dimana 7.899 KK masuk dalam kemiskinan ekstrim.

Selain itu perencanaan program dan kegiatan subsektor kelautan dan perikanan terkait dengan Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang yaitu **Pengarusutamaan Berbasis Gender (PUG) dan Penurunan Stunting**. PUG di DKP dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang dilakukan antara lain melalui (a) penerapan perencanaan dan penganggaran *responsive gender* (PPRG), (b) Penguatan kelembagaan PUG di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, (c) penyiapan *roadmap* PUG, (d) penyusunan data terpilih, (e) pengembangan statistik gender, (f) pengembangan model

pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit dan UPTD. Kemudian PUG ditransformasi kedalam program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.

### **Rencana Program dan Kegiatan**

#### ***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***

Kegiatan meliputi:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
5. Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,

#### ***Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil***

kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

1. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi;
2. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi;
3. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

#### ***Program pengelolaan perikanan tangkap***

kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil;
2. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;

3. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT;
4. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil;
5. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
6. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi;
7. Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT;
8. Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
9. Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT;
10. Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

***Program Pengelolaan Perikanan Budidaya***

kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
2. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta

Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing;

3. Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing;
4. Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
5. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut.
6. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Darat.

***Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan***

kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai dengan 12 mil
2. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

***Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan***

kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Struktur program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6. Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang
<b>BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT</b>					
1	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Ruang Laut	4.601.986.000	4.932.844.000	+
		Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	4.113.713.000	4.478.774.000	+
		sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	50.264.000	50.264.000	-
		sub kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	3.587.464.000	3.564.392.000	-
		sub kegiatan Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	412.035.000	799.720.000	-
		sub kegiatan Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	63.950.000	64.398.000	+
		Keg. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	223.852.000	189.649.000	-
		sub kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	100.900.000	95.400.000	-
		sub kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	27.336.000	19.436.000	-
		sub kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	78.863.000	74.813.000	-
		sub kegiatan Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	16.753.000	0	Sub kegiatan ini dihapus karena sudah bukan merupakan kewenangan Provinsi lagi melainkan pusat
		Keg. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	264.421.000	264.421.000	
		sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	98.815.000	98.815.000	
		sub kegiatan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	89.806.000	89.806.000	
		sub kegiatan Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	70.800.000	70.800.000	
		sub kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5.000.000	5.000.000	
<b>BIDANG PERIKANAN TANGKAP</b>					
2	Meningkatnya	Program Pengelolaan Perikanan	34.606.881.543	37.631.424.775	+

	kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan / Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	Tangkap			
		Keg. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	15.550.208.063	18.528.775.175	+
		sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	825.001.800	825.001.800	
		sub kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	23.995.275	199.566.200	+
		sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	14.701.210.988	17.504.207.175	+
		Keg. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	587.323.600	526.113.600	-
		sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	587.323.600	526.113.600	-
		Keg. Penetapan lokasi pembanguna serta pengolahan pelabuhan perikanan Provinsi	18.469.349.880	18.576.536.000	+
		sub kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	18.469.349.880	18.576.536.000	+
<b>BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA &amp; P2HP</b>					
3	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan / Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	8.122.201.131	7.936.155.978	-
		Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	8.122.201.131	7.936.155.978	-
		sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	651.848.000	658.388.000	-
		sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	972.662.056	703.615.056	-
		sub kegiatan Penyediaan PraSarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.300.691.075	2.377.152.922	+
		sub kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.197.000.000	4.197.000.000	
4	Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3.774.849.029	3.931.343.098	+
		Keg. Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	108.998.000	108.995.600	-
		sub kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	49.982.000	49.982.000	
		sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan	59.016.000	59.013.600	-

		Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
		Keg.Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	613.231.179	631.727.648	-
		sub kegiatan Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	613.231.179	631.727.648	+
		Keg. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.052.619.850	3.190.619.850	-
		sub kegiatan Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	30.216.000	34.336.000	-
		sub kegiatan Pemberian Insentif dan Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.932.351.850	3.075.766.850	-
		sub kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	90.052.000	80.517.000	-
<b>BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>					
5	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan serta regulasi – deregulasi terkait pengelolaan SDKP	Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	5.238.006.240	5.123.330.350	-
		Keg. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	5.064.886.240	4.950.210.350	-
		sub kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	3.215.732.650	3.193.114.650	-
		sub kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai dengan 12 Mil	603.237.500	542.738.000	-
		sub kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Laut sampai dengan 12 Mil	253.120.000	273.520.000	+
		sub kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas(POKMASWAS)	992.796.090	940.837.700	-
		Keg.Pengawasan Sumber Perikanan di wilayah sungai, Danau,Waduk,Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	173.120.000	173.120.000	
		sub kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di wilayah sungai, Danau,Waduk,Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	55.280.000	55.280.000	
		sub kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, Danau,Waduk,Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	74.760.000	74.760.000	
		sub kegiatan Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	43.080.000	43.080.000	
<b>UPT BALAI PERBENIHAN PERIKANAN</b>					
	Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.630.248.400	2.946.901.950	+

	perikanan yang berdaya saing				
		Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	2.630.248.400	2.946.901.950	+
		sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.421.369.600	1.421.942.200	+
		sub kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.208.878.800	1.524.959.750	+
<b>UPT PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN</b>					
	Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	399.959.255	424.921.065	+
		Keg. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	399.959.255	424.921.065	+
		sub kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	199.984.170	226.496.030	+
		sub kegiatan Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	199.975.085	198.425.035	-
<b>UPT PELABUHAN PERIKANAN WIL I</b>					
	Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	553.574.826	595.026.496	+
		Keg. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	177.128.034	179.937.751	+
		sub kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	177.128.034	179.937.751	+
		Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	376.446.792	415.088.745	+
		sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	288.462.042	316.354.042	+
		sub kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	87.984.750	98.734.703	+
<b>UPT PELABUHAN PERIKANAN WIL II</b>					
	Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	442.647.342	444.718.947	+
		Keg. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	128.719.962	127.761.967	-
		sub kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	128.719.962	127.761.967	-
		Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	313.927.380	316.956.980	+
		sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	236.927.380	239.956.980	+
		sub kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	77.000.000	77.000.000	
<b>UPT PELABUHAN PERIKANAN WIL III</b>					
	Peningkatan	Program Pengelolaan Perikanan	546.599.540	495.568.818	-

	produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	Tangkap			
		Keg. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	219.921.000	218.962.000	-
		sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	29.550.000	28.550.000	-
		sub kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	190.371.000	190.412.000	+
		Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	326.678.540	276.606.818	-
		sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	266.417.540	238.351.818	-
		sub kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	60.261.000	38.255.000	-
<b>UPT PELABUHAN PERIKANAN WIL IV</b>					
	Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	567.758.882	569.441.503	+
		Keg. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	300.105.595	299.711.758	-
		sub kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	300.105.595	299.711.758	-
		Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	267.653.287	269.729.745	+
		sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	219.950.784	217.826.984	-
		sub kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	47.702.503	51.902.761	+
<b>UPT. KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TOMINI</b>					
	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Ruang Laut	234.657.399	438.019.399	+
		Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	119.990.000	323.352.000	+
		sub kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	89.990.000	323.352.000	-
		sub kegiatan Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	30.000.000	0	Sub kegiatan ini dihapus karena anggaran tidak dapat dicairkan karena kesalahan input rekening anggaran
		Keg. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	114.667.399	114.667.399	
		sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	26.550.000	26.550.000	
		sub kegiatan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	39.100.000	39.100.000	
		sub kegiatan Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	49.017.399	49.017.399	
<b>UPT. KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DOBOTO</b>					
	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Ruang Laut	331.190.000	323.419.200	-
		Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas	191.190.000	182.957.200	-

		Bumi			
		sub kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	90.000.000	82.287.200	-
		sub kegiatan Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	101.190.000	100.670.000	-
		Keg. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	140.000.000	140.462.000	+
		sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	30.000.000	30.000.000	
		sub kegiatan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	40.000.000	40.462.000	+
		sub kegiatan Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	70.000.000	70.000.000	
<b>UPT. KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL BANGGAI</b>					
	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Ruang Laut	210.189.000	210.183.400	-
		Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	210.189.000	210.183.400	-
		sub kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	179.929.000	179.923.400	-
		sub kegiatan Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	30.260.000	30.260.000	
<b>UPT. KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL MOROWALI</b>					
	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Ruang Laut	230.000.000	247.000.000	+
		Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	120.000.000	137.000.000	+
		sub kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	90.000.000	107.000.000	+
		sub kegiatan Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	30.000.000	30.000.000	
		Keg. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	110.000.000	110.000.000	
		sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	30.000.000	30.000.000	
		sub kegiatan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	40.000.000	40.000.000	
		sub kegiatan Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	40.000.000	40.000.000	
		<b>T O T A L</b>	<b>62.490.748.587</b>	<b>68.407.692.779</b>	<b>+</b>

Anggaran sub kegiatan pencatatan dan pengadministrasian izin lokasi perairan dalam sistem kadaster laut pada kegiatan penerbitan izin pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi pada program pengelolaan ruang laut pada Bidang Pengelolaan Ruang Laut dihapus. Anggaran yang semula Rp16.753.000,- menjadi Rp0,00.

Hal ini disebabkan perubahan kewenangan, dimana kadaster laut sudah bukan lagi menjadi kewenangan daerah melainkan menjadi kewenangan pusat.

Anggaran sub kegiatan rehabilitasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil pada kegiatan pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi pada program pengelolaan ruang laut pada UPT. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulai Kecil Tomini dihapus. Ini disebabkan oleh kesalahan penempatan rekening anggaran belanja, sehingga anggaran tersebut tidak dapat direalisasikan.

Struktur program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung pencapaian sasaran Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 7. Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang
<b>SEKRETARIAT</b>					
1	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (SEKRETARIAT)	22.709.297.767	24.186.522.788	+
		Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	726.709.000	713.252.000	+
		sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	417.049.000	449.310.000	+
		sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	309.660.000	263.942.000	-
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.384.849.793	19.124.781.984	+
		sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.667.076.793	17.852.208.984	+
		sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	297.625.000	832.465.000	+
		sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	138.584.000	195.364.000	+
		sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	146.024.000	103.024.000	-
		sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	135.540.000	141.720.000	+
		Keg. Administrasi kepegawaian perangkat daerah	169.943.000	105.643.000	-
		sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	169.943.000	105.643.000	-
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.067.203.402	1.843.503.009	+
		sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	730.533.172	1.367.190.079	+
		sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	117.898.230	97.026.930	-
		sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	218.772.000	379.286.000	+
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.390.373.532	1.441.262.088	+
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	49.192.000	29.320.000	-
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	602.281.532	635.542.088	+
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	738.900.000	776.400.000	+

		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	970.219.040	958.080.707	-
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	501.200.000	525.910.000	+
		sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	469.019.040	432.170.707	-
<b>UPT BALAI PERBENIHAN PERIKANAN</b>					
	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.557.159.315	1.665.726.923	+
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	81.720.000	81.720.000	
		sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	81.720.000	81.720.000	
		Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	72.420.000	42.260.000	-
		sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72.420.000	42.260.000	-
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.544.614	94.175.864	+
		sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.544.614	94.175.864	+
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.314.924.701	1.410.021.059	+
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	627.924.701	723.021.059	+
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	687.000.000	687.000.000	
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.550.000	37.550.000	
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.550.000	37.550.000	
<b>UPT PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN</b>					
	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	730.067.057	730.753.057	-
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	160.899.000	161.585.000	+
		sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	160.899.000	161.585.000	+
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.440.907	49.440.907	
		sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.461.357	20.461.357	
		sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.579.550	5.579.550	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.400.000	23.400.000	
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	430.457.590	430.457.590	
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.000.000	129.000.000	
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.457.590	4.457.590	
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	297.000.000	297.000.000	
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.269.560	89.269.560	
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.269.560	89.269.560	
<b>UPT PELABUHAN PERIKANAN WIL I</b>					
	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.163.205.786	2.125.947.609	-
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	149.902.450	153.302.450	+
		sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	149.902.450	153.302.450	+
		Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.563.600	25.563.600	

		sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.563.600	25.563.600	
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.420.082	59.828.907	-
		sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.420.082	59.828.907	-
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.792.024.104	1.787.707.102	-
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.361.824.104	1.787.707.102	+
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	430.200.000	430.200.000	
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.295.550	99.545.550	-
		sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.295.550	99.545.550	-
<b>UPT PELABUHAN PERIKANAN WIL II</b>					
	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	801.304.394	818.346.279	+
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	184.192.606	180.793.647	-
		sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	184.192.606	180.793.647	-
		Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.084.190	50.084.190	
		sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50.084.190	50.084.190	
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.992.185	13.960.185	-
		sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.992.185	13.960.185	-
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	435.126.663	455.599.507	+
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	159.526.663	179.999.507	+
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	275.600.000	275.600.000	
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.908.750	117.908.750	
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.438.750	17.438.750	
		sub kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	100.470.000	100.470.000	
<b>UPT PELABUHAN PERIKANAN WIL III</b>					
	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.194.119.452	1.283.591.264	+
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	145.211.493	172.452.681	+
		sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	127.672.000	156.270.000	+
		sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	17.539.493	16.182.681	-
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.530.559	33.557.937	-
		sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.899.159	14.907.287	-
		sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.631.400	18.650.650	-
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	891.277.400	952.080.646	+
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.890.000	5.880.000	-
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	569.374.668	640.791.520	+
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.532.732	37.259.126	+
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	279.480.000	268.150.000	-
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah	120.100.000	125.500.000	+

# Laporan Kinerja Perangkat Daerah 2023

		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.080.000	65.980.000	+
		sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.020.000	29.520.000	
		sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	30.000.000	
<b>UPT. PELABUHAN PERIKANAN WIL IV</b>					
	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	667.877.623	668.453.176	+
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	99.871.900	118.472.000	+
		sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	99.871.900	118.472.000	+
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.004.116	49.023.471	+
		sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.004.116	49.023.471	+
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	383.038.825	356.298.825	-
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	254.800.000	228.060.000	-
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	128.238.825	128.238.825	
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.962.782	144.658.880	+
		sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	128.512.782	127.768.880	-
		sub kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12.450.000	16.890.000	+
<b>UPT. KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TOMINI</b>					
	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	160.295.969	156.919.649	-
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.000.000	35.810.000	+
		sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30.000.000	35.810.000	+
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.751.302	39.751.302	
		sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.750.000	19.750.000	
		sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.998.978	9.998.978	
		sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.002.324	10.002.324	
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.200.000	69.013.680	-
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.200.000	3.213.680	-
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.000.000	65.800.000	+
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.344.667	12.344.667	
		sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.344.667	12.344.667	
<b>UPT. KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DOBOTO</b>					
	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	160.490.000	153.406.000	-
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.760.000	44.760.000	
		sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44.760.000	44.760.000	
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.800.000	23.656.000	-
		sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.800.000	13.800.000	-
		sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.800.000	9.856.000	-
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang	60.000.000	60.000.000	

		Urusan Pemerintahan Daerah			
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.000.000	60.000.000	
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.930.000	24.990.000	-
		sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.930.000	24.990.000	-
<b>UPT. KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL BANGGAI</b>					
	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	179.681.625	192.799.214	+
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.981.625	112.099.214	+
		sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.981.625	112.099.214	+
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.700.000	80.700.000	
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.900.000	9.900.000	
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.800.000	70.800.000	
<b>UPT. KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL MOROWALI</b>					
	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	160.650.000	175.756.000	+
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.000.000	45.106.000	+
		sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30.000.000	45.106.000	+
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.000.000	40.000.000	
		sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	20.000.000	
		sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	10.000.000	
		sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	10.000.000	
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.200.000	78.200.000	
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.200.000	18.200.000	
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.000.000	60.000.000	
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.450.000	12.450.000	
		sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.450.000	12.450.000	
		<b>T O T A L</b>	<b>30.484.148.988</b>	<b>30.000.818.159</b>	<b>-</b>

## 2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/O9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah adalah:

- ❖ Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

- ❖ Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

IKU juga digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perencanaan jangka menengah; perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja (PK), pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah; serta pemantauan dan pengendalian kinerja (monev) pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan. Analisis dan monitoring - evaluasi (monev) kinerja dilakukan dengan memperhatikan pencapaian IKU. Hal ini dilakukan secara berkala dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Dasar pelaksanaan monitoring dan evaluasi mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku dan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang mengacu pada pencapaian sasaran. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku baik melalui pengambilan data primer maupun sekunder termasuk melakukan sampling terhadap beberapa titik sampel.

Berdasarkan Visi dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah maka untuk tahun 2021 - 2026 Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dicapai sebagaimana tersebut pada tabel berikut.

Tabel 8. IKU DKP Sulteng Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks yang menunjukkan kumulatif nilai di area manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan regulasi, penatan tata laksana, penataan system manajemen SDM,	Hasil pencapaian Kelompok Kerja area manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-	Sekretariat

		penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik	undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penguatan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan public	
2. Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	2. Nilai Tukar Perikanan	Indeks yang diterima nelayan / Indeks yang dibayar nelayan x 100	Data Indeks harga yang diterima nelayan / pembudidaya (It) dan Indeks harga yang dibayar nelayan / pembudidaya (Ib) kab/kota	Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP
3. Terwujudnya pengelolaan Sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	3. Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	Kawasan lindung perairan / Total luas perairan teritorial	Data kawasan perairan yang dilindungi di kab/kota	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan UPT Konservasi Wilayah I, II, III & IV
4. peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	4. Produksi Perikanan (ton)	Jumlah Produksi Ikan (Ton) / Target Daerah (Ton) x100%	Data Produksi Perikanan Kab/Kota	Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP, UPT Balai Perbenihan Perikanan dan UPT Pelabuhan Wilayah I, II, III & IV
	5. Angka Konsumsi Ikan (kg/perkapita/tahun)	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) / Target Daerah (Kg) x100%	Data Jumlah ikan (kg) yang dikonsumsi oleh rata-rata	Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP dan UPT PMHP

			penduduk pertahun kab/kota	
5. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan serta regulasi-deregulasi terkait pengelolaan SDKP	6. Jumlah Hari Operasi Pengawasan SDKP (hari Operasi)	Jumlah hari operasi yang dilakukan oleh aparat pengawasan kelautan dan perikanan baik melalui: (a) Pengawasan Ruang Laut; (b) Pengawasan Budidaya/ P2HP dan (c) Pengawasan Terpadu Kelautan dan Perikanan	Data pelaku usaha perikanan kab/kota yang memiliki dasar hukum	Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

## 2.5 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja DKP Sulteng dibuat setiap tahun sebagai suatu bentuk perjanjian kerja antara Gubernur Sulawesi Tengah dengan pimpinan OPD dalam hal ini Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 DKP Sulteng sebagai berikut:



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. Moh. Arif Latjuba, SE, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. Rusdy Mastura**

Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

**H. RUSDY MASTURA**

Palu, Juni 2023

PIHAK PERTAMA

**H. MOH. ARIF LATJUBA, SE, M.Si**

Jumlah Anggaran : Rp 63.585.867.577,-

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	28.462.867.041	APBD
02 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	18.190.196.808	APBD
03 Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya	5.382.826.439	APBD
04 Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2.088.148.281	APBD
05 Program Pengelolaan Ruang Laut	2.346.815.586	APBD
06 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	2.159.649.564	APBD
07 Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	1.819.999.858	APBD
08 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	723.126.000	APBN-Dekon
09 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	167.700.000	APBN-TP
10 Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya	1.145.056.000	APBN-Dekon
11 Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	643.960.000	APBN-Dekon
12 Program Kualitas Lingkungan Hidup	350.240.000	APBN-Dekon
13 Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	185.282.000	APBN-Dekon

Palu, Juni 2023

GUBERNUR SULAWESI TENGAH



H. RUSDY MASTURA

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



H. MOH. ARIF LATJUBA, SE, M.Si

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	64
2	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Perikanan	100,8
3	Terwujudnya pengelolaan Sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	19,98
4	peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	Produksi Perikanan (ton)	972.693,75
		Angka Konsumsi Ikan (kg/perkapita/tahun)	57,05
5	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan serta regulasi-deregulasi terkait pengelolaan SDKP	Jumlah Hari Operasi Pengawasan SDKP (hari Operasi)	250

Upaya pencapaian target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023, DKP Sulteng didukung dengan dana APBD dan APBN, sebagai berikut:

**Tabel 9. Alokasi Anggaran APBD dan APBN Tahun 2023**

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 32.158.211.959	APBD
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 39.736.180.539	APBD
Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya	Rp. 10.883.057.928	APBD
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Rp. 2.157.393.800	APBD
Program Pengelolaan Ruang Laut	Rp. 6.151.465.999	APBD
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Rp. 5.123.330.350	APBD
Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Rp. 4.356.264.163	APBD
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	Rp. 1.096.498.000	APBN-Dekon
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Rp. 1.172.364.000	APBN-Dekon

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan suatu program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun pencapaian tujuan DKP Sulteng dijelaskan sebagai berikut:

**“Peningkatan PDRB dan Penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin Kelautan dan Perikanan Berbasis Pengelolaan SDKP yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”**

Pengukuran kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 10. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi	Hijau Tua
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau Muda
3	66% ≤ 75%	Sedang	Kuning Tua
4	51% ≤ 65%	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50%	Sangat Rendah	Merah

#### A. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Keberhasilan tujuan dan sasaran diukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Tahun 2023 DKP Sulteng telah

menetapkan 5 sasaran strategis (SS) dan 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai, yang dirincikan sebagai berikut:

Tabel 11. Target dan Realisasi DKP Sulteng Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi*	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	1. Indeks Reformasi Birokrasi	64	67,44	105,38	HT
2	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	2. Nilai Tukar Perikanan	100,8	103,12	102,30	HT
3	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	3. Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	19,98	18,22	91,19	HT
4	Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	4. Produksi perikanan (ton)	972.693,75	1.052.510,18	108,21	HT
		5. Angka Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	57,05	67,36	118,07	HT
5	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan serta regulasi-deregulasi terkait pengelolaan SDKP	6. Jumlah hari operasi pengawasan SDKP (hari operasi)	250	265	106,00	HT

\* angka sementara

Analisis capaian kinerja per sasaran strategis (SS) tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut:

**SS 1: Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah**

❖ *IKU 1 Indeks Reformasi Birokrasi*

hasil evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) DKP Tahun 2023 adalah 67,44 dengan predikat baik (B). Nilai ini melebihi target sebesar 105,38%, dimana target PMPRB tahun 2023 adalah 64. Nilai ini diperoleh dari penilaian kategori pengungkit dan reform.

Kategori pengungkit dan reform ini sama-sama terdiri dari 8 (delapan) sub kategori yaitu: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan regulasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik. Nilai hasil evaluasi untuk kategori pemenuhan 11,49 sedangkan kategori reform 15,95. Selain

kedua kategori tersebut, yang menjadi objek dalam penilaian juga adalah akuntabilitas kinerja keuangan, dimana DKP memperoleh nilai 40.

Dengan nilai 67,44 (kategori baik) menunjukkan komitmen dan antusiasme DKP dalam upaya reformasi birokrasi, dimana yang menjadi tujuan akhir dari pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) ini adalah agar pemerintah dalam hal ini DKP bertransformasi menjadi birokrasi yang bermanfaat untuk masyarakat.

## **SS 2: Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan**

### ❖ *IKU 2 Nilai tukar perikanan (NTP)*

merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani perikanan. NTP diperoleh dari hasil perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) pada sektor perikanan (nelayan dan pembudidaya). NTP di atas angka 100 dapat diartikan bahwa petani perikanan mengalami surplus (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha melebihi pertumbuhan pengeluaran rumah tangga), NTP sama dengan 100 berarti petani perikanan mengalami titik impas (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha sama dengan pengeluaran rumah tangga) dan NTP di bawah 100 berarti petani perikanan mengalami defisit (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha di bawah pertumbuhan pengeluaran rumah tangga). Secara sederhana angka NTP diperoleh dari hasil perbandingan indeks harga yang diterima petani/nelayan/pembudidaya (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani/nelayan/pembudidaya (Ib).

Mulai Januari 2020 dilakukan perubahan tahun dasar penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP) dari tahun dasar (2012=100) menjadi tahun dasar (2018=100) baik untuk It

maupun Ib. Ada beberapa perubahan yang mendasar dalam penghitungan indeks harga 2018=100 dibandingkan dengan indeks harga 2012=100, khususnya mengenai paket komoditas maupun diagram timbang pada masing-masing subsektor yakni Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan, dan Perikanan. Pada Subsektor Perikanan, diagram timbang dibangun dari Kegiatan Penangkapan Ikan maupun Kegiatan Budidaya Ikan.

Tahun 2023 target Nilai Tukar Perikanan 100,8 dan terealisasi sebesar 103,12. Capaian ini melebihi target sebesar 102,30%.

Tabel 12. Capaian Nilai Tukar Perikanan (NTP)  
Sulawesi Tengah Tahun 2023

Bulan	Indeks harga yang diterima petani perikanan (It)	Indeks harga yang dibayarkan petani perikanan (Ib)	NTP
Januari	120,61	114,35	105,48
Februari	120,78	114,67	105,33
Maret	121,27	114,98	105,47
April	122,39	115,13	101,07
Mei	122,3	115,39	106,00
Juni	122,12	115,52	105,71
Juli	122,12	115,66	105,58
Agustus	122,37	115,71	105,75
September	122,17	115,97	105,34
Oktober	117,48	118,02	99,54
November	115,94	116,77	97,48
Desember	113,91	120,28	94,70
<b>Rata-rata</b>	<b>120,29</b>	<b>116,04</b>	<b>103,12</b>

Nilai tukar perikanan (NTP) berfluktuasi sepanjang tahun 2023, hal ini dipengaruhi oleh indeks harga yang diterima petani perikanan (It) dengan indeks harga yang dibayar petani perikanan (Ib). Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa NTP terendah terjadi pada bulan Desember dan yang tertinggi terjadi pada bulan Mei. Meskipun NTP pada bulan Oktober sampai Desember berada dibawah 100 tetapi secara keseluruhan NTP

2023 berada di atas 100, karena pada pada bulan Januari sampai dengan September angka NTP diatas 100.

### **Sasaran 3 Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan**

- ❖ IKU 3 Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial

Pengembangan kawasan konservasi perairan daerah merupakan salah satu amanat UU No. 27 Tahun 2007 Jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau pulau kecil dengan ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

Berdasarkan KEPMEN-KP NO. 50 Tahun 2019 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Donggala, Buol, Tolitoli, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah, KEPMEN-KP NO. 51 Tahun 2019 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, KEPMEN-KP NO. 52 Tahun 2019 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Morowali, Morowali Utara, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, KEPMEN-KP NO. 53 Tahun 2019 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, status kawasan konservasi Sulawesi Tengah seluas 1.338.291,55 Ha. Data ini merupakan hasil dari konsultasi publik dan penyamaan data

dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP-RI) Tahun 2019.

Tahun 2023 target rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial adalah 19,98 dan teralisasi 18,22 atau sebesar 91,19%. Luas perairan Sulawesi Tengah sebesar 77.295,90 Km<sup>2</sup> dan luas kawasan konservasi sampai dengan tahun 2023 sebesar 14.082,92 Km<sup>2</sup>. Kawasan konservasi perairan Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13. Kawasan Konservasi Perairan di Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2023

No.	KKP3K	Kabupaten	Luas (ha)	Kegiatan
1.	DOBOTO	Donggala	1.192,34	Rehabilitasi Terumbu Karang dan Mangrove
		Toli-toli	56.250,08	Pengembangan Informasi Kawasan
		Buol	17.320,30	Sosialisasi Kawasan Konservasi dan Rehabilitasi Terumbu Karang
LUAS KAWASAN			74.762,72	
2.	TOMINI	Parigi Moutong	131.693,59	Pengembangan Informasi Kawasan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove
		Poso	282,87	Pengembangan Informasi Kawasan
		Tojo Una-Una	7.563,40	Pengembangan Informasi Kawasan
LUAS KAWASAN			139.539,87	
3.	DALAKA	Banggai	111.253,93	Pengembangan Rehabilitasi Terumbu Karang
		Banggai Kepulauan	151.273,94	Pengaturan Waktu Penangkapan Gurita di Kawasan Konservasi
		Banggai Laut	633.620,99	Pengaturan Waktu Penangkapan Gurita di Kawasan Konservasi
LUAS KAWASAN			896.148,86	

4.	MOROWALI	Morowali	257.612,03	Pengembangan Kawasan Pemanfaatan Terbatas dan Sosialisasi Jenis Hewan dilindungi
		Morowali Utara	41.983,07	Pengembangan Kawasan Pemanfaatan Terbatas dan Sosialisasi Jenis Hewan dilindungi
LUAS KAWASAN			299.595,10	
LUAS TOTAL			1.408.291,55	

#### Sasaran 4 Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing

##### ❖ IKU 4 Jumlah Produksi Perikanan

Produksi perikanan merupakan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan budidaya meliputi jaring apung laut, jaring apung tawar, jaring tancap tawar, karamba, kolam, minapadi sawah, rumput laut, tambak dan budidaya laut lainnya. Produksi budidaya terbesar di dominasi oleh rumput laut, udang dan ikan air tawar (nila, mas dan lele). Perikanan tangkap meliputi perikanan laut dan perairan umum daratan (PUD). Komoditi unggulan perikanan tangkap di Sulawesi Tengah adalah ikan tongkol, tuna, cakalang (TTC) dan ikan demersal.

Tahun 2023 target produksi perikanan sebesar 972.693,75 ton dan terealisasi dengan angka sementara sebesar 1.052.510,18 ton\* atau sebesar 108,21%. Capaian ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya banyaknya bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada nelayan dan pembudidaya di Sulawesi Tengah.

Produksi sementara perikanan budidaya dan perikanan tangkap tahun 2023 per kabupaten kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14. Produksi Perikanan Tahun 2023 Per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan (Ton)*		
		Perikanan Budidaya	Perikanan Tangkap	Total
1	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	631.354,146	13.187,55	644.541,70
2	KABUPATEN BANGGAI	623,881	196,88	820,76
3	KABUPATEN MOROWALI	34.291,3	33.566,85	67.858,15
4	KABUPATEN POSO	4.496,376	3.094,80	7.591,18
5	KABUPATEN DONGGALA	21.778	143.891,82	165.669,82
6	KABUPATEN TOLI TOLI	1.565,751	16.037,70	17.603,45
7	KABUPATEN BUOL	716,738	15.429,15	16.145,89
8	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	24.378,226	31.162,59	55.540,82
9	KABUPATEN TOJO UNA-UNA	8.226,390	15,77	8.242,16
10	KABUPATEN SIGI	899,470	-	899,47
11	KOTA PALU	124,750	1.163,10	1.287,85
12	KABUPATEN BANGGAI LAUT	29.707,626	30.192,60	59.900,23
13	KABUPATEN MOROWALI UTARA	5.357,663	1.051,05	6.408,71
	<b>TOTAL</b>	<b>763.520,32</b>	<b>288.989,86</b>	<b>1.052.510,18</b>

❖ *IKU 5 Angka Konsumsi Ikan (AKI)*

Konsumsi ikan adalah jumlah kebutuhan/permintaan ikan yang menggambarkan fungsi dari jumlah penduduk dan necara permintaan ikan untuk konsumsi domestik. Ikan mencakup ikan segar dan olahan sesuai dengan ketentuan dari BPS. Nilai AKI diperoleh berdasarkan penghitungan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP RI) menggunakan 4 (empat) kelompok jenis ikan dan udang segar/basah, kelompok ikan dan udang awetan dan kelompok ikan makanan jadi (goreng, bakar, dll) dan kelompok bumbu-bumbuan. Untuk kelompok ikan dan udang awetan, kelompok ikan makanan jadi (goreng, bakar, dll) dan kelompok bumbu-bumbuan dikonversi ke dalam bentuk ikan setara segar.

Target Angka Konsumsi Ikan yang ingin dicapai pada tahun 2023 adalah sebesar 57,05 Kg/kap/th dan terealisasi dengan angka sementara 67,36 Kg/Kap/Th\* atau 118,07%. Capaian ini diperkirakan masih akan naik dengan selesainya

proses penghitungan AKI Nasional pada awal semester II. Bila dilihat capaian ini lebih tinggi daripada target AKI Nasional yaitu sebesar 57,27 Kg/Kap/Th. Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan ini salah satunya merupakan dampak dari publisitas produk perikanan kelautan dan kampanye gemar makan ikan disamping imbas dari Sulawesi Tengah yang merupakan daerah pesisir dimana ikan merupakan salah satu komoditas utama.

Kebutuhan terbesar ikan konsumsi rumah tangga selama tahun 2023 antara lain ikan tongkol/tuna/cakalang, selar, ekor kuning, kembung, cumi-cumi/sotong/gurita, udang/lobster, teri, bandeng, nila, mujair.

#### **Sasaran Strategis 5 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan serta Regulasi-Deregulasi terkait Pengelolaan SDKP**

##### *❖ IKU 6 Jumlah Hari Operasi Pengawasan SDKP (hari operasi)*

Dalam menjaga kedaulatan wilayah pengelolaan perikanan Provinsi Sulawesi Tengah perlu dilakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan didukung oleh beberapa hal antara lain SDM pengawas, armada pengawasan dan lain sebagainya. Tahun 2023 target hari operasi pengawasan SDKP adalah 250 hari dan terealisasi 265 hari atau sebesar 106,00%.

#### **B. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelum**

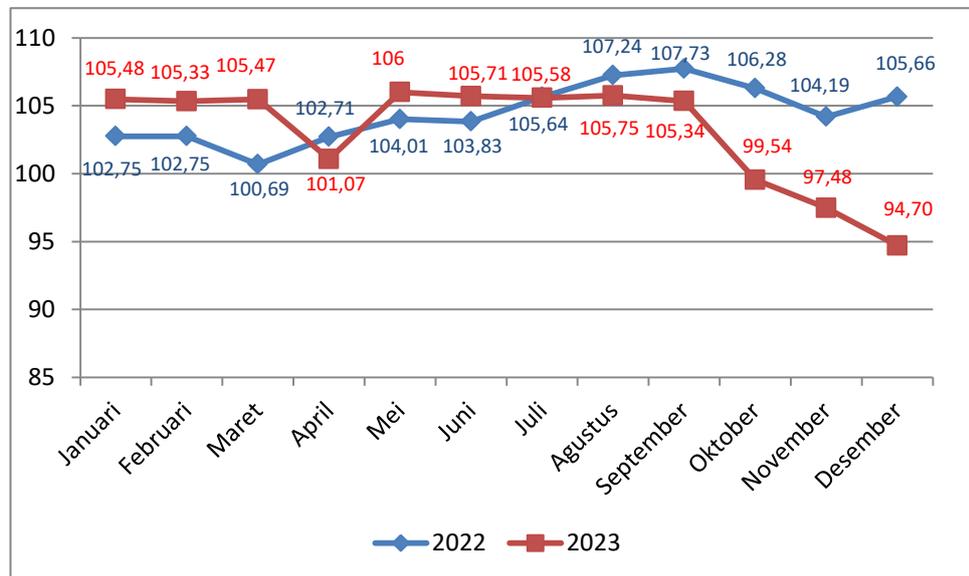
Capaian tahun 2023 ini akan dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021. Perbandingan capaian IKU DKP tahun 2023, 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 15. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 s/d 2023

No	sasaran	Indikator Sasaran	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian
1	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	-	-	64	67,44	105,38
2	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Nilai Tukar perikanan (NTP) (%)	-	-	-	100,00	104,46	104,46	100,80	103,12	102,30
3	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	-	-	-	19,14	18,22	95,19	19,98	18,22	91,19
4	Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdayasaing	Produksi perikanan (ton)	-	-	-	1.491.033,02	925.623,14	62,08	972.693,75	1.052.510,18	108,21
		Angka konsumsi ikan (kg/kap/th)	53,83	67,04	116,27	55,39	67,36	121,61	57,05	67,36	118,07
5	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan serta regulasi – deregulasi pengelolaan SDKP	Jumlah hari operasi pengawasan SDKP (hari operasi)	-	-	-	200	228	114,00	250	265	106,00

- *Indeks Reformasi Birokrasi*, nilai ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indeks reformasi birokrasi baru dimasukkan kedalam IKU DKP pada tahun 2023;

- *Nilai Tukar Perikanan (NTP)*, Perkembangan NTP Perikanan Sulteng bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu (q to q), NTP Sulteng cenderung turun. Pada Tahun 2022 NTP sebesar 104,46 sedangkan Tahun 2023 sebesar 103,12 mengalami penurunan sebesar 1,28%. Akan tetapi, walaupun nilai ini turun tetapi angkanya masih diatas 100 yang artinya indeks harga yang diterima (lt) lebih besar dari indeks harga yang dibayarkan (lb). Tahun 2021 target ini dibagi menjadi nilai tukar perikanan budidaya dan nilai tukar perikanan tangkap. Grafik NTP tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada gambar berikut;



Gambar 15. NTP Sulteng Tahun 2022 – 2023

- *Rasio Kawasan Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial*, jika dibandingkan dengan tahun 2022 untuk indikator ini masih tetap sama yakni 18,22 pada Tahun 2023. Tahun 2021 target ini belum ada sehingga tidak dapat dibandingkan;
- *Produksi Perikanan*, capaian produksi perikanan tahun 2023 meningkat 14,26% dari capaian tahun 2022. Pada tahun 2022 produksi perikanan sebesar 921.126,40 ton dan pada tahun 2023 sebesar 1.052.510,18 ton. Capaian ini pun lebih tinggi dari tahun 2021 yang sebesar 939.907,08 ton yang targetnya dibagi menjadi produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan

budidaya. Meskipun begtu capaian tahun 2023 ini masih merupakan angka sementara dimana sampai laporan ini dibuat proses validasi data belum selesai, diperkirakan angka produksi ini masih akan naik;

- *Angka Konsumsi Ikan*, capaian untuk indikator ini masih sama antara tahun 2022 dan 2023 yakni 67,36 kg/kap/th. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 capaian ini meningkat sekitar 0,48, dimana capaian tahu 2021 sebesar 67,04 kg/kap/th. Diperkirakan capaian tahun 2023 ini masih akan naik mengingat proses perhitungannya belum selesai;
- *Jumlah Hari Operasi Pengawasan SDKP*, capaian pada indikator ini mengalami peningkatan 16,23% dari tahun sebelum, dimana pada tahun 2022 hari operasi dilaksanakan sebanyak 228 hari dan pada tahun 2023 sebanyak 265 hari. Tahun 2021 indikator ini belum ada;
- Tahun 2023 dan 2022 DKP memiliki sasaran sebanyak 5 (lima) dan indikator kinerja sebanyak 6 (enam) sedangkan pada tahun 2021, DKP memiliki sasaran sebanyak 8 (delapan) dan 12 (dua belas) indikator kinerja.

### **C. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Renstra 2021-2026**

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan Tahun 2023 terhadap Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 DKP Sulteng dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Di Renstra 2021 - 2026

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	67,44	66,00	102,18
2	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Perikanan (NTP) (%)	103,12	103,40	99,73
3	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	18,22	22,55	80,80
4	Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	Produksi Perikanan (Ton)	1.052.510,18	1.596.764,28	65,91
		Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th)	67,36	62,35	108,03
5	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan serta regulasi-deregulasi terkait pengelolaan SDKP	Jumlah hari operasi pengawasan SDKP (hari operasi)	265	400	66,25

Dari tabel diatas terlihat bahwa:

1. Capaian indikator *Nilai Tukar Perikanan (NTP)* tahun 2023 melebihi 102,30% dari target Renstra yang telah ditetapkan. Hal ini menandakan indeks yang diterima petani perikanan (It) lebih besar dari jumlah yang dibayarkan (Ib);
2. Capaian indikator *Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial* belum mencapai target target renstra 2021-2026, dimana target adalah 19,98 dan tercapai 18,22 atau sebesar 91,19%. Sampai dengan tahun 2021 luas kawasan konservasi perairan di Sulawesi Tengah sebesar 1.338.291,55 Ha dan pada tahun 2022 meningkat sebesar 70.000 Ha sehingga menjadi 1.408.291,55 Ha atau 14.082,92 Km<sup>2</sup> pada tahun 2022;
3. Capaian indikator *Produksi Perikanan (Ton)* mencapai target renstra sebesar 108,21%, akan tetapi ini masih merupakan angka sementara dimana diperkirakan angka ini akan terus

naik setelah proses validasi data antara daerah dan pusat selesai pada akhir triwulan I nanti.

4. Capaian indikator *Angka Konsumsi Ikan (Kg/kap/Th)* melebihi 118,07% dari target renstra. Angka ini sama dengan capaian tahun sebelumnya dimana angka pada tahun 2023 ini masih merupakan angka sementara dan diperkirakan masih akan naik pada akhir proses perhitungan.
5. Capaian indikator *Jumlah Hari Operasi Pengawasan SDKP (hari operasi)* telah melebihi target renstra yakni 106,00%. Selama tahun 2023 giat operasi dilaksanakan sebanyak 265 hari.

#### D. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Standar Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja utama (IKU) DKP Sulteng tahun 2023 dengan capaian Nasional dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 17. Perbandingan Capaian IKU Dinas dengan Capaian Nasional Tahun 2023

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023*	Realisasi Nasional 2023*	% Capaian
Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	67,44	-	-
Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Perikanan (%)	103,12	105,22	98,00
Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	18,22	-	-
Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	Jumlah produksi perikanan (Ton)	1.052.510,18	9.780.000,00	10,76
	Angka konsumsi ikan (Kg/kap/th)	67,36	57,27	117,62
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan serta regulasi-deregulasi terkait pengelolaan SDKP	Jumlah hari operasi pengawasan SDKP (hari operasi)	265	-	-

\*) angka sementara

Perbandingan capaian IKU Dinas dan Capaian nasional Tahun 2023:

1. Tidak ada penilaian Indeks Reformasi Birokrasi nasional, sehingga IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian nasional;
2. Dari tabel diatas dapat dilihat capaian NTP Nasional lebih tinggi dari capaian NTP Sulawesi Tengah. Dimana capaian nasional sebesar 105,22 dan capaian Sulawesi Tengah 103,12. Akan tetapi meskipun capaian NTP Sulteng lebih rendah tetapi nilainya berada diatas angka 100. Hal ini berarti bahwa nelayan/pembudidaya mengalami surplus (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha melebihi pertumbuhan pengeluaran rumah tangga);
3. Tahun 2023 indikator *rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial*, tidak dilaksanakan oleh Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP) RI sehingga capaian kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian nasional;
4. Tahun 2023 target produksi perikanan Sulawesi Tengah 0,97 juta ton atau sebesar 3,44% dari target nasional yakni 28,22 juta ton. Realisasi produksi perikanan Sulawesi Tengah 2023 sebesar 1,05 juta ton\* atau sebesar 10,74% dari capaian target nasional yang mencapai 9,78 juta ton\*. Hal ini berarti produksi perikanan Sulawesi Tengah berkontribusi 10,74% terhadap produksi perikanan nasional;
5. Tahun 2023 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI melalui Ditjen Penguatan Daya Saing (DJPDS) menetapkan target nasional untuk indikator *angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)* sebesar 57,50 dan tercapai 57,27\* sedangkan target DKP Sulteng sebesar 57,05 dan tercapai 67,34\*. Jika dibandingkan dengan capaian nasional maka capaian konsumsi makan ikan Sulteng sudah melebihi target daerah

maupun target nasional. Untuk skala nasional Sulawesi Tengah menempati peringkat ke-10 (Sepuluh) capaian angka konsumsi ikan. Provinsi dengan capaian tertinggi secara berturut-turut adalah Maluku, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara.

6. Pengukuran indikator *jumlah hari operasi pengawasan SDKP (hari operasi)* tidak dilaksanakan oleh Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP) RI sehingga realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan dengan realisasi nasional.

#### **E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja**

Sebagian besar target kinerja DKP Sulteng tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja DKP Sulteng, antara lain:

1. **Indeks Reformasi Birokrasi**, target untuk indikator ini adalah 64 dan tercapai 67,44 atau sebesar 105,38%. Keberhasilan capaian ini tidak terlepas dari komitmen DKP untuk memberikan layanan birokrasi yang bermanfaat untuk masyarakat.
2. **Nilai Tukar Perikanan**, target untuk indikator ini adalah 100,8 dan terealisasi sebesar 103,12. Capaian ini melebihi target sebesar 102,30%. Pencapaian ini tidak lepas dari upaya yang terus dilakukan oleh DKP Sulteng dalam menindaklanjuti masalah-masalah/kebutuhan-kebutuhan yang terjadi dilapangan. Sepanjang Tahun 2023 DKP banyak memberikan bantuan-bantuan kepada nelayan dan pembudidaya di Sulawesi Tengah serta pendampingan bagi pelau usaha perikanan juga peningkatan sarana prasarana perikanan tangkap. bagi nelayan dan pembudidaya.
3. **Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial**, Penetapan Kawasan Konservasi

merupakan salah satu upaya perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungannya yang dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan secara berkelanjutan. Kawasan konservasi tersebut diharapkan dapat menjaga sistem rantai makanan dan siklus hidup ikan ekonomis penting; menjamin keberadaan budaya, adat istiadat dan nilai sejarah; dan menjamin akses area masyarakat lokal dalam pemanfaatan kawasan konservasi sehingga dapat mengurangi laju degradasi habitat dan kepunahan sumberdaya ikan serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan konservasi adalah luasnya kawasan perairan dan keterbatasan jumlah SDM yang mengelola kawasan konservasi. Solusi yang telah diupayakan oleh DKP Sulteng adalah dengan mengutamakan pelaksanaan kegiatan konservasi diwilayah yang dianggap paling krusial kerusakan habitatnya.

4. **Produksi perikanan**, tahun 2023 target produksi perikanan sebesar 972.693,75 ton dan terealisasi sementara 1.052.510,18 ton\* atau pencapaian sebesar 108,21. Keberhasilan ini tentu saja tidak lepas dari upaya yang terus dilakukan oleh DKP dalam menyikapi kebutuhan-kebutuhan/permasalahan-permasalahan nelayan dan pembudidaya dilapangan. Pemberian bantuan, pendampingan, serta peningkatan sarana prasarana perikanan adalah beberapa upaya yang dilakukan oleh DKP dalam rangka pencapaian produksi perikanan.
5. **Angka Konsumsi Ikan**, tahun 2023 target angka konsumsi ikan adalah 57,05 Kg/kap/th dan terealisasi sebesar 67,36 Kg/Kap/Th\* atau 118,07%. Setiap tahun DKP melaksanakan kampanye gemar makan ikan dan publisitas olahan produk perikanan kelautan. Hal inilah yang menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam pencapaian nilai angka konsumsi ikan ini.

6. **Hari operasi pengawasan SDKP**, capaian indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan. Capaian hanya 106,00% atau sebanyak 265 hari dari target 250 hari.

Selain 6 (enam) indikator utama diatas, terdapat indikator program, kegiatan dan sub kegiatan DKP. Capaian kinerja indikator program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 19. Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan DKP Tahun 2023

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja*	
SEKRETARIAT					
1	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (SEKRETARIAT)	Indeks Reformasi Birokrasi PD (Nilai)	64	67,44
		Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun (dokumen)	3	3
		sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	2	2
		sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	1	1
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1	1
		sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (laporan)	1	1
		sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	1	1
		sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	1	1
		Keg. Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1	1
		sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3	3
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	1	1
		sub kegiatan Penyediaan	Jumlah Paket Peralatan dan	1	3

		Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)		
		sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1	1
		sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	1
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	48	109
		sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	48	128
<b>BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT</b>					
1	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Ruang Laut	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100	185,09
		Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	65	61,93
		sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen RZWP3K/ Review RZWP3K yang tersusun (dokumen)	1	1
		sub kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	528.757	528.757
			Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional (Ha)	1.502.512	1.338.291,55
		sub kegiatan Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	3.697,25	3.229,20
		sub kegiatan Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Org)	50	50
		Keg. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi yang difasilitasi (%)	100	300
		sub kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi (Rekomendasi)	1	10
		sub kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang	1	10

		Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Diterbitkan (Rekomendasi)		
		sub kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan (Rekomendasi)	1	1
		sub kegiatan Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan (Rekomendasi)	1	1
		Keg. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)	100	160
		sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)	80	96
		sub kegiatan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (kelompok)	1	2
		sub kegiatan Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (orang)	80	96
		sub kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (kelompok)	1	2
<b>BIDANG PERIKANAN TANGKAP</b>					
2	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan / Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan tangkap (ton)	252.693,75	288.989,86
			Nilai Tukar Nelayan (%)	102,00	104,04
		Keg. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	<50%	<50%
		sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	12	12
		sub kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (unit)	1	1
		sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (unit)	200	210
		Keg. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Persentase penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang difasilitasi (%)	100	100
		sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Data)	1	1
		Keg. Penetapan lokasi pembanguna serta pengolahan pelabuhan perikanan Provinsi	Jumlah pelabuhan yang dikembangkan (lokasi)	8	8
		sub kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan	2	2

		perikanan	Perikanan yang Tersedia (unit)		
<b>BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA &amp; P2HP</b>					
3	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan / Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	720.000	763.520,32
			Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (%)	100,50	101,12
		Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah kawasan pembudidayaan yang dikelola	12	12
		sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (unit)	3	3
		Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah kawasan pembudidayaan yang dikelola	13	13
		sub kegiatan Penyediaan PraSarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (unit)	8	8
		sub kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak (Unit)	50	50
4	Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Perikanan Olahan (Kg)	6.535.950	6.432.115
		Keg. Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi (%)	100	100
		sub kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi (Rekomendasi)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)	1	1
		Keg. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang dibina mutu dan keamanan hasil perikanannya (unit)	15	15
			Jumlah SKP yang difasilitasi (buah)	58	129
		sub kegiatan Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan	20	20

			Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing (unit usaha)		
		Keg. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase bahan baku yang memenuhi kebutuhan industri pengolahan ikan provinsi (%)	60	100
		sub kegiatan Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (dokumen)	1	1
		sub kegiatan Pemberian Insentif dan Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas (unit usaha)	1	1
		sub kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir (Dokumen)	1	1
<b>BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>					
5	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan serta regulasi – deregulasi terkait pengelolaan SDKP	Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase penyelesaian kasus tindak pidana KP yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan melalui penerapan sanksi administratif dan sanksi pidana (%)	40	100
		Keg. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pengawas Perikanan, PPNs dan Polsus Perikanan yang difasilitasi dan berkompetensi mendukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Org)	35	35
		sub kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil yang diperiksa Kepatuhan (unit)	15	19
			Jumlah dokumen hasil pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	1	1
		sub kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai dengan 12 Mil	Jumlah Kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya (unit)	250	265
			Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	1	1
		sub kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Unit Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang diperiksa Kepatuhan (unit)	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha bidang pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	1	1
		sub kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang dibina (kelompok)	30	31
			Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang terdaftar dan aktif (kelompok)	30	31

		Keg.Pengawasan Sumber Perikanan di wilayah sungai, Danau,Waduk,Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) di wilayah PUD (Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya) yang terbina (unit)	5	5
		sub kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di wilayah sungai, Danau,Waduk,Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Unit Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang diperiksa kepatuhannya (unit)	15	15
			Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya (dokumen)	1	1
		sub kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, Danau,Waduk,Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Unit Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang diperiksa kepatuhannya (unit)	5	16
			Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya (dokumen)	1	1
		sub kegiatan Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (unit)	4	40
			Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi (dokumen)	1	1
<b>UPT BALAI PERBENIHAN PERIKANAN</b>					
	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai survei kepuasan pelanggan (nilai)	80	80
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan(laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1	1
		Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi BMD (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	1	1
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1	1

		Kantor	Disediakan (paket)		
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1	1
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	13	13
Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi benih ikan dan udang bermutu (benih)	3.700.000	2.837.870
			Target PAD (Rp)	1.785.000.000	1.795.700.000
		Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah produksi ikan dan udang konsumsi (Kg)	31.300	31.507
			Jumlah Calon Induk Unggul (Ekor)	800	400
		sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	6	6
		sub kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3	3
<b>UPT PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN</b>					
	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai survei kepuasan pelanggan (Nilai)	80	80
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1	1
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1	1
		Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	1	1
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah laporan Penyediaan	1	1

		Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (laporan)		
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1	1
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	9	9
	Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase UMKM binaan yang telah menerapkan standar mutu hasil perikanan (%)	60	60
		Keg. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang dibina mutu dan keamanan hasil perikananannya (unit)	8	8
		sub kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	4	4
		sub kegiatan Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha (unit usaha)	4	4
<b>UPT PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I</b>					
	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai survei kepuasan pelanggan (nilai)	80	80
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1	1
		Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)	1	1
		sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (org)	1	1
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1	1
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1	1
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1	1

			Pemerintahan Daerah (laporan)		
		sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	7	7
Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Keg. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan wil 1 (Kg)	3.858.750	2.781.347
			PAD Pelabuhan wil 1 (Rp)	2.170.600.000	2.230.900.800
		sub kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah SPB (Surat Perintah Berlayar) yang diterbitkan wil I (surat)	2.500	3.294
		Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah pelabuhan yang dikelola di wilayah I (pelabuhan)	2	2
			Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah I (balok)	155.151	71.319
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	6	6
		sub kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Layanan)	8	8
<b>UPT PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II</b>					
	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai survei kepuasan pelanggan (nilai)	80	80
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1	1
		Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)	1	1
		sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	1	1
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1	1
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1	1
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	6	6
		sub kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	3	3
Peningkatan produksi	Program Pengelolaan Perikanan		Produksi Ikan yang	1.832.340	2.202.160

	sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	Tangkap	didaratkan di pelabuhan wil 2 (Kg)		
			PAD Pelabuhan wil 2 (Rp)	165.850.000	179.765.000
		Keg. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah SPB(Surat Perintah Berlayar) yang diterbitkan (surat)	785	384
		sub kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (unit)	2	2
		Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah pelabuhan yang dikelola di wil II (pelabuhan)	2	2
		sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah II (balok)	4.200	10.041
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	6	6
		sub kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Layanan)	8	8
<b>UPT PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III</b>					
	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai survei kepuasan pelanggan (nilai)	80	80
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1	1
		sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	1	1
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1	1
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1	1
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	2	2

		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)		
		sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	2	2
		sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	1	1
	Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan wil III (Kg)	685.443	673.665
			PAD Pelabuhan wil III (Rp)	1.013.550.000	1.013.582.000
		Keg. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah SPB (Surat Perintah Berlayar) yang diterbitkan (wil III) (surat)	135	184
		sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)	1	1
		Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah pelabuhan yang dikelola di wilayah III (pelabuhan)	2	2
		sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah III (balok)	11.900	30.226
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	6	6
		sub kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Layanan)	7	7
<b>UPT PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV</b>					
	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai survei kepuasan pelanggan (nilai)	80	80
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1	1
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1	1
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1	1
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1	1
		sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	1	1
		sub kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	1	1
	Peningkatan produksi sumberdaya kelautan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan	1.389.988	1.615.000

dan perikanan yang berdaya saing		Wilayah IV (Kg)	PAD Pelabuhan Wilayah IV (Rp.1000)	
			230.000.000	209.760.000
	Keg. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Ketersediaan syahbandar perikanan (orang)	1	1
	sub kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	2	1
	Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)	1	1
	sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah pelabuhan yang dikelola di wilayah IV (pelabuhan)	7.529	5.995
		Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah IV (balok)	6	6
	sub kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	5	5
<b>UPT KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TOMINI</b>				
Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan (nilai)	80	80
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1	1
	sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1	1
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1	1
	sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1	1
	sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	1	1
	sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1	1
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1	1
	sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1	1
	sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1	1
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1	1
	sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	1	1
Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Ruang Laut	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100	100
	Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	70	70
	sub kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	132.189	132.189

			Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional (Ha)	292.910,12	292.910,12
		sub kegiatan Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	3	3
		Keg. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)	100	100
		sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	10	10
		sub kegiatan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kelompok)	1	1
		sub kegiatan Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)	30	30
<b>UPT KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DOBOTO</b>					
	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan (nilai)	80	80
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1	1
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan (paket)	1	1
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1	1
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1	1
		sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	1	1
	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Ruang Laut	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100	100
		Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	70	70
		sub kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	132.189	132.189
			Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang	60.042,72	60.042,72

		sub kegiatan Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	operasional (Ha) Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	3	3
		Keg. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)	100	100
		sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	10	10
		sub kegiatan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kelompok)	1	1
		sub kegiatan Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)	30	30
<b>UPT KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL BANGGAI</b>					
	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan (nilai)	80	80
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1	1
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1	1
	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Ruang Laut	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100	100
		Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	70	70
		sub kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	132.189	132.189
			Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional (Ha)	856.649,13	856.649,13
		sub kegiatan Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	3	3
<b>UPT KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL MOROWALI</b>					
	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan (nilai)	80	80
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1	1
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1	1

		Kantor	Disediakan (paket)		
		sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1	1
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1	1
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1	1
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1	1
		sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	1	1
	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Ruang Laut	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100	100
		Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	70	70
		sub kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	132.189	132.189
			Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional (Ha)	292.910,12	292.910,12
		sub kegiatan Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	3	3
		Keg. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)	100	100
		sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	10	10
		sub kegiatan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kelompok)	1	1
		sub kegiatan Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)	30	30

Berdasarkan tabel diatas, jika dilihat secara keseluruhan, hampir semua target indikator program, kegiatan dan sub kegiatan DKP telah tercapai, meskipun masih ada beberapa indikator yang belum tercapai. Akan tetapi, ini masih merupakan angka

sementara, dimana untuk beberapa indikator belum semua datanya masuk.

Pencapaian target indikator ini menunjukkan keberhasilan DKP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pencapaian ini didukung oleh sumberdaya yang dimiliki DKP antara lain, SDM, anggaran dan sarana prasarana.

**F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya**

Efisiensi diartikan sebagai perbandingan yang terbaik antara input (anggaran) dengan output (kinerja unit kerja), seperti juga hasil optimal yang diperoleh dengan penggunaan sumber yang terbatas. Atau dapat dikatakan sebagai hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Pengukuran efisiensi sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas suatu program kegiatan yang telah ditetapkan melalui target kinerja dengan dukungan anggaran yang tersedia.

Tabel 19. Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Meningkatnya indikator reformasi birokrasi perangkat daerah (SS 1)							
	Indeks Reformasi Perikanan	64	67,44	105,38	32.158.211.959	30.002.758.768	93,30	12,08
	<b>TOTAL SS1</b>	<b>64</b>	<b>67,44</b>	<b>105,38</b>	<b>32.158.211.959</b>	<b>30.002.758.768</b>	<b>93,30</b>	<b>12,08</b>
2	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan (SS 2)							
	Nilai Tukar Perikanan (%)	100,8	103,12	102,30	45.567.580.753	42.780.397.713	93,88	8,42
	<b>TOTAL SS2</b>	<b>100,8</b>	<b>103,12</b>	<b>102,30</b>	<b>45.567.580.753</b>	<b>42.780.397.713</b>	<b>93,88</b>	<b>8,42</b>
3	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan (SS 3)							
	Rasio kawasan lindung perariran terhadap total luas perairan teritorial	19,98	18,22	91,19	6.151.465.999	4.615.299.345	75,03	16,16
	<b>TOTAL SS3</b>	<b>19,98</b>	<b>18,22</b>	<b>91,19</b>	<b>6.151.465.999</b>	<b>4.615.299.345</b>	<b>75,03</b>	<b>16,16</b>
4	Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing (SS 4)							
	Jumlah produksi perikanan (Ton)	972.693,75	1.052.510,18	108,21	50.619.238.467	47.707.866.899	94,25	13,96
	Angka konsumsi ikan (Kg/kap/th)	57,05	67,36	118,07	4.356.264.163	4.279.090.643	98,23	19,84

	TOTAL SS4	486.375,40	526.288,77	113,14	54.975.502.630	51.986.957.542	94,56	18,58
5	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan serta regulasi-deregulasi terkait pengelolaan SDKP (SS 5)							
	Jumlah hari operasi pengawasan SDKP (hari operasi)	250	265	106,00	5.123.330.350	4.915.851.599	95,95	10,05
	TOTAL SS5	250	244	106,00	5.123.330.350	4.915.851.599	95,95	10,05

Sasaran Strategis - 1, “Meningkatnya indikator reformasi birokrasi perangkat daerah” memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) indeks reformasi birokrasi. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) ini sebesar 105,38% hal ini menunjukkan indikator yang telah ditetapkan sebagai alat ukur untuk mengukur capaian strategis ini telah melampaui target yang telah ditetapkan. Anggaran yang dibutuhkan untuk dalam mencapai sasaran strategis ini sebesar Rp32.158.211.959,- dan terealisasi 30.002.758.768,- atau sebesar 93,30%. Jika dibandingkan dengan NPSS maka terdapat efisiensi sebesar 12,08 terhadap penggunaan anggaran pada sasaran strategis ini.

Sasaran Strategis - 2, “meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan” memiliki IKU yakni Nilai Tukar Perikanan (%). NPSS ini sebesar 102,30% hal ini menunjukkan indikator yang telah ditetapkan sebagai alat ukur untuk mengukur capaian sasaran strategis ini telah melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun anggaran yang dibutuhkan dalam mencapai sasaran strategis ini sebesar Rp45.567.580.753,- dan teralisasi Rp42.780.397.713,- atau sebesar 93,88%. Jika dibandingkan terhadap NPSS maka pada sasaran strategis ini terdapat efisiensi sebesar 8,42 terhadap penggunaan anggaran yang telah direncanakan.

Sasaran Strategis - 3, “terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan” memiliki IKU yakni Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial. NPSS sasaran strategis in sebesar 91,19% hal ini menunjukkan indikator yang telah ditetapkan sebagai alat ukur

untuk mengukur capaian sasaran strategis ini belum mencapai target yang ditetapkan. Adapun anggaran yang dibutuhkan dalam mencapai sasaran strategis ini sebesar Rp6.151.465.999,- dan teralisasi Rp4.615.299.345 atau sebesar 75,03%. Jika dibandingkan terhadap NPSS maka pada sasaran strategis ini terdapat efisiensi 16,16 terhadap penggunaan anggaran yang telah direncanakan.

Sasaran Strategis – 4, “peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing” memiliki IKU yakni (1) Jumlah Produksi Perikanan (Ton) dan (2) Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th). NPSS sebesar 113,14% hal ini menunjukkan indikator yang telah ditetapkan sebagai alat ukur untuk mengukur capaian sasaran strategis ini semuanya telah mencapai target yang ditetapkan. Adapun anggaran yang dibutuhkan dalam mencapai sasaran strategis ini sebesar Rp54.975.502.630,- dan teralisasi Rp51.986.957.542 atau sebesar 94,56%. Jika dibandingkan terhadap NPSS maka pada sasaran strategis ini terdapat efisiensi sebesar 18,58% terhadap penggunaan anggaran yang telah direncanakan.

Sasaran Strategis – 5, “terselenggaranya pengendalian dan pengawasan serta regulasi-deregulasi terkait pengelolaan SDKP” memiliki IKU yakni Jumlah Hari Operasi Pengawasan SDKP (hari Operasi). Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) ini sebesar 106,00% yang menunjukkan bahwa indikator yang telah ditetapkan sebagai alat ukur untuk mengukur capaian sasaran strategis ini telah mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Adapun anggaran yang dibutuhkan dalam mencapai sasaran strategis ini sebesar Rp5.123.330.350,- dan teralisasi Rp4.915.851.599,- atau sebesar 95,95%. Dengan perbandingan NPSS dan realisasi anggaran maka terlihat efisiensi sebesar 10,05%.

Tabel 20. Efisiensi Anggaran Tahun 2023  
Berdasarkan Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	NPSS	% Realisasi Anggaran	% Efisiensi Anggaran
1.	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	32.158.211.959	29.976.528.768	105,38	93,30	12,08
2.	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	45.567.580.753	42.780.397.713	102,30	93,88	8,42
3.	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	6.151.465.999	4.615.299.345	91,19	75,03	16,16
4.	Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	54.975.502.630	51.986.957.542	113,14	94,56	18,58
5.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan serta regulasi-deregulasi terkait pengelolaan SDKP	5.123.330.350	4.915.851.599	106,00	95,95	10,05

Dalam rangka peningkatan kualitas anggaran, DKP Sulteng terus melakukan upaya perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran antara lain melalui, pelaksanaan rapat koordinasi secara rutin untuk melakukan penajaman program kegiatan prioritas, efisiensi perjalanan dinas disesuaikan dengan urgensi kegiatan, penundaan pelaksanaan kegiatan yang tidak mendesak dan lain sebagainya.

#### **G. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja**

Dalam pencapaian perjanjian kinerja, DKP Sulteng didukung oleh beberapa program dan anggaran. Adapun alokasi anggaran per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 21. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
SEKRETARIAT										
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (SEKRETARIAT)	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi PD	Indeks Reformasi Birokrasi PD	Nilai	64	<b>24.186.522.788</b>	67,44	<b>22.108.833.739</b>	105,37	91,41
	Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	Dokumen	3	<b>713.252.000</b>	3	<b>672.662.097</b>	66,67	94,31
	sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan	Dokumen	2	449.310.000	2	425.220.097	100	94,64
	sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Dokumen	1	263.942.000	1	247.442.000	100	93,75
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	Laporan	1	<b>19.124.781.984</b>	1	<b>17.235.597.697</b>	100	90,12
	sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org / bln	1	17.852.208.984	1	15.977.120.669	100	89,50
	sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	832.465.000	1	819.039.039	100	98,39
	sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	1	195.364.000	1	195.061.989	100	99,85
	sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	103.024.000	1	102.766.000	100	99,75
	sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	1	141.720.000	1	141.610.000	100	99,92
	Keg. Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	1	<b>105.643.000</b>	1	102.549.000	100	97,07
	sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	105.643.000	3	102.549.000	100	97,07
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	Laporan	1	<b>1.843.503.009</b>	1	<b>1.785.612.835</b>	100	96,86
	sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Paket	1	1.367.190.079	3	1.332.415.035	300	97,46

# Laporan Kinerja Perangkat Daerah 2023

		Disediakan							
sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	97.026.930	1	90.789.280	100	93,57
sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	379.286.000	1	362.408.520	100	95,55
Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	<b>1.441.262.088</b>	1	<b>1.408.155.621</b>	100	97,70
sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	29.320.000	1	29.270.000	100	99,83
sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	1	635.542.088	1	615.996.623	100	96,92
sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1	776.400.000	1	762.888.998	100	98,26
Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	<b>958.080.707</b>	1	<b>904.256.489</b>	100	94,38
sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	48	525.910.000	109	488.562.629	227,08	92,90
sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	48	432.170.707	128	415.693.860	266,67	96,19
<b>BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT</b>									
1	Program Pengelolaan Ruang Laut	Terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	%	100	4.932.844.000	185,09	<b>3.466.794.422</b>	185,09	70,28
	Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		%	65	4.478.774.000	61,93	<b>3.014.804.257</b>	95,28	67,31
	sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen RZWP3K/ Review RZWP3K yang tersusun	Dokumen	1	50.264.000	1	49.727.217	100	98,93
	sub kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	528.757	3.564.392.000	528.757	2.484.274.897	100	69,70
		Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional	Ha	1.502.512		1.338.291,55			
	sub kegiatan Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	3.697,25	799.720.000	3.229,20	417.004.143	87,34	52,14
	sub kegiatan Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir	Jumlah Masyarakat Pesisir	Org	50	64.398.0	50	63.798.0	100	99,07

	dan Pulau-Pulau Kecil		dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil			00		00		
	Keg. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi yang difasilitasi	%	100	189.649.000	300	<b>188.274.972</b>	300	99,28
	sub kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Rekomendasi	1	95.400.000	10	94.440.000	1000	98,99
	sub kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional		Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	Rekomendasi	1	19.436.000	10	19.340.831	100	99,51
	sub kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir		Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	Rekomendasi	1	74.813.000	1	74.494.141	100	99,57
	Keg. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K	%	100	264.421.000	160	<b>263.715.193</b>	160	99,73
	sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	80	98.815.000	96	98.266.271	120	99,44
	sub kegiatan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok	1	89.806.000	2	89.648.922	200	99,83
	sub kegiatan Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang	80	70.800.000	96	70.800.000	120	100,00
	sub kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta		Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan	Kelompok	1	5.000.000	2	5.000.000	200	100,00

	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan							
<b>BIDANG PERIKANAN TANGKAP</b>										
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan / peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	Produksi Perikanan tangkap	Ton	252.693,75	37.631.424.775	288.989,86	<b>35.458.041.643</b>	114,36	94,22
			Nilai Tukar Nelayan	%	102,00		104,04			
	Keg. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	%	<50%	18.528.775.175	<50%	<b>16.969.259.020</b>	100	91,58
	sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	12	825.001.800	12	701.096.150	100	84,98
	sub kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	1	199.566.200	1	164.418.500	100	82,39
	sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	200	17.504.207.175	210	16.103.744.370	105	92,00
	Keg. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Persentase penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang difasilitasi	%	100	526.113.600	100	<b>421.054.699</b>	100	80,03
	sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Data	1	526.113.600	1	421.054.699	100	80,03
	Keg. Penetapan lokasi pembanguna serta pengolahan pelabuhan perikanan Provinsi		Jumlah pelabuhan yang dikembangkan	Lokasi	8	18.576.536.000	8	<b>18.067.727.924</b>	100	97,26
	sub kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	2	18.576.536.000	2	18.067.727.924	100	97,26
<b>BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA &amp; P2HP</b>										
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan / peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	720.000	7.936.155.978	763.520,32	<b>7.322.356.070</b>	106,04	92,27
			Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	%	100,50		101,12			100,62
	Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah kawasan pembudidayaan yang dikelola	Kawasan	12	1.362.003.056	12	<b>1.323.207.629</b>	100	97,15

	sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	658.388.000	1	630.514.344	100	95,77
	sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	3	703.615.056	3	692.693.285	100	98,45
	Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		Jumlah kawasan pembudidayaan yang dikelola	Kawasan	13	6.574.152.922	13	<b>5.999.148.441</b>	100	91,25
	sub kegiatan Penyediaan PraSarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	8	2.377.152.922	8	2.136.492.478	100	89,88
	sub kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	50	4.197.000.000	50	3.862.655.963	100	92,03
4	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	Produksi Perikanan Olahan	Kg	6.535.950	<b>3.931.343.098</b>	6.432.115	<b>3.855.643.702</b>	98,41	98,07
	Keg.Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi	%	100	108.998.000	100	<b>108.552.975</b>	95,33	
	sub kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi	Rekomendasi	1	49.982.000	1	49.932.000	100	99,59
	sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	1	59.016.000	1	58.620.975	100	99,90
	Keg.Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang dibina mutu dan keamanan hasil perikanan	Unit	15	631.727.648	15	<b>613.469.170</b>	100,00	97,11
			Jumlah SKP yang	buah	58		129		236,21	

	sub kegiatan Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing		difasilitasi	Unit usaha	20	631.727.648	20	613.469.170	100	97,11
	Keg. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase bahan baku yang memenuhi kebutuhan industri pengolahan ikan provinsi	%	60	<b>3.190.619.850</b>	100	<b>3.133.621.557</b>	166,6666667	98,21
	sub kegiatan Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	34.336.000	1	34.330.000	100	99,98
	sub kegiatan Pemberian Insentif dan Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	Unit usaha	1	3.075.766.850	1	3.022.837.557	100	98,28
	sub kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	dokumen	1	80.517.000	1	76.454.000	100	94,95
<b>BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>										
5	Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan serta regulasi – deregulasi terkait pengelolaan SDKP	Persentase penyelesaian kasus tindak pidana KP yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan melalui penerapan sanksi administratif dan sanksi pidana	%	40	<b>5.123.330.350</b>	100	<b>4.915.851.599</b>	250	95,95
	Keg. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		Jumlah Pengawas Perikanan, PPNS dan Polsus Perikanan yang difasilitasi dan berkompentensi mendukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Org	35	<b>4.950.210.350</b>	35	4.742.836.599	100	95,81

	sub kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil yang diperiksa Kepatuhannya	Unit	15	3.193.114.650	19	2.995.996.101	126,67	93,83
	sub kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai dengan 12 Mil	Jumlah Kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya	Unit	250	542.738.000	265	540.467.248	106	99,58
		Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1		1		100	
	sub kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Unit Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang diperiksa Kepatuhannya	Unit	20	273.520.000	21	266.880.000	105	97,57
	sub kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang dibina	Kelompok	30	940.837.700	31	939.493.250	103,33333333	99,86
		Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang terdaftar dan aktif	kelompok	30		31		3,3333333333	
	Keg.Pengawasan Sumber Perikanan di wilayah sungai, Danau,Waduk,Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) di wilayah PUD (Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya) yang terbina	Unit	5	<b>173.120.000</b>	5	<b>173.015.000</b>	100	99,94
	sub kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di wilayah sungai, Danau,Waduk,Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Unit Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang diperiksa kepatuhannya	Unit	15	55.280.000	15	55.255.000	100	99,95
		Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	1		1		100	
	sub kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, Danau,Waduk,Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Unit Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang diperiksa kepatuhannya	Unit	5	74.760.000	16	74.700.000	320	99,92
		Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan bidang	Dokumen	1		1		100	

			pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya							
	sub kegiatan Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Unit Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Unit	4	43.080.000	40	43.060.000	1000	99,95
			Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	dokumen	1		1		100	
<b>UPT BALAI PERBENIHAN PERIKANAN</b>										
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Nilai survei kepuasan pelanggan	Nilai	80	<b>1.665.726.923</b>	80	<b>1.656.470.960</b>	100	99,44
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	1	<b>81.720.000</b>	1	<b>81.720.000</b>	100	99,44
	sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	81.720.000	1	81720000	100	99,44
	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan administrasi BMD	Laporan	1	<b>42.260.000</b>	1	<b>41.870.000</b>	100	99,08
	sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	42.260.000	1	41.870.000	100	99,08
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	Laporan	1	<b>94.175.864</b>	1	91.821.700	100	97,50
	sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	94.175.864	1	91.821.700	100	97,50
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	1	<b>1.410.021.059</b>	1	<b>1.403.607.260</b>	100	99,55
	sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	723.021.059	1	723.007.260	100	100,00
	sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan	1	687.000.000	1	680.600.000	100	99,07
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Laporan	1	<b>37.550.000</b>	1	<b>37.452.000</b>	100	99,74

			Pemerintahan Daerah							
	sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	37.550.000	13	37.452.000	100	99,74
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	Jumlah produksi benih ikan dan udang bermutu	Benih	3.700.000	2.946.901.950	2.837.870	<b>2.900.996.614</b>	76,70	98,44
			Target PAD	Rp	1.785.000.000		1.795.700.000		98,07	
	Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		Jumlah produksi ikan dan udang konsumsi	Kg	31.300	2.946.901.950	31.507	<b>2.900.996.614</b>	100,66	98,44
			Jumlah Calon Induk Unggul	Ekor	800		400		50	
	sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	6	1.421.942.200	6	1.411.241.614	100	99,25
	sub kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	3	1.524.959.750	3	1.489.755.000	100	97,69
<b>UPT PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN</b>										
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Nilai survei kepuasan pelanggan	Nilai	80	<b>730.753.057</b>	80	<b>719.197.928</b>	100	98,42
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	1	<b>161.585.000</b>	1	<b>161.315.000</b>	100	99,83
	sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	161.585.000	1	<b>161.315.000</b>	100	99,83
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	Laporan	1	<b>49.440.907</b>	1	<b>49.440.138</b>	100	100,00
	sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.461.357	1	20.460.588	100	100,00
	sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	5.579.550	1	5.579.550	100	100,00
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	1	23.400.000	1	23.400.000	100	100,00

# Laporan Kinerja Perangkat Daerah 2023

SKPD		dan Konsultasi SKPD							
Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	<b>430.457.590</b>	1	<b>422.561.556</b>	100	98,17
sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	129.000.000	1	125.661.556	100	97,41
sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	1	4.457.590	1	3.600.000	100	80,76
sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan	1	297.000.000	1	293.300.000	100	98,75
Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	1	<b>89.269.560</b>	1	<b>85.881.234</b>	100	96,20
sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	9	89.269.560	9	85.881.234	100,00	96,20
Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	Persentase UMKM binaan yang telah menerapkan standar mutu hasil perikanan	%	60	424.921.065	60	<b>423.446.941</b>	100	99,65
Keg. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang dibina mutu dan keamanan hasil perikananannya	unit	8	424.921.065	8	<b>423.446.941</b>	100	99,65
sub kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit usaha	4	226.496.030	4	225.349.500	100	99,49
sub kegiatan Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing		Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha	Unit usaha	4	198.425.035	4	198.097.441	100	99,83
<b>UPT PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I</b>									
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi	Nilai survei kepuasan pelanggan	nilai	80	<b>2.125.947.609</b>	80	<b>2.102.291.436</b>	100	98,89

	perangkat daerah									
Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	1	<b>153.302.450</b>	1	<b>149.790.700</b>	100	97,71	
sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	153.302.450	1	149.790.700	100	97,71	
Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	1	<b>25.563.600</b>	1	<b>24.789.700</b>	100	96,97	
sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Org	1	25.563.600	1	24.789.700	100	96,97	
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	Laporan	1	<b>59.828.907</b>	1	<b>56.789.490</b>	100	94,92	
sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	59.828.907	1	56.789.490	100	94,92	
Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	<b>1.787.707.102</b>	1	<b>1.771.413.746</b>	100	99,09	
sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1.357.507.102	1	1.357.413.746	100	99,99	
sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1	430.200.000	1	414.000.000	100	96,23	
Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	1	<b>99.545.550</b>	1	<b>99.507.800</b>	100	99,96	
sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	7	99.545.550	7	99.507.800	100	99,96	
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan wil 1	Kg	3.858.750	595.026.496	2.781.347	<b>575.063.730</b>	72,08	96,65	
		PAD Pelabuhan wil 1	Rp.	2.170.600.000		2.230.900.800		101,40		
Keg. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		Jumlah SPB (Surat Perintah Berlayar) yang diterbitkan wil I	surat	2.500	179.937.751	3.294	169.904.730	119,08	94,42	
sub kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	unit	1	179.937.751	1	169.904.730	100	94,42	
Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Jumlah pelabuhan yang dikelola di wilayah I	Pelabuhan	2	415.088.745	2	<b>405.159.000</b>	100	97,61	
sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah I	Balok	155.151	316.354.042	71.319	312.703.800	69,28	98,85	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan	Unit	6		6		100		

# Laporan Kinerja Perangkat Daerah 2023

			Perikanan yang Tersedia							
	sub kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	layanan	8	98.734.703	8	92.455.200	100	93,64
<b>UPT PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II</b>										
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Nilai survei kepuasan pelanggan	Nilai	80	<b>818.346.279</b>	80	<b>809.846.278</b>	100	98,96
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	1	<b>180.793.647</b>	1	<b>179.906.583</b>	100	99,51
	sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	180.793.647	1	179.906.583	100	99,51
	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	1	<b>50.084.190</b>	1	<b>49.206.715</b>	100	98,25
	sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	50.084.190	1	49.206.715	100	98,25
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	Laporan	1	<b>13.960.185</b>	1	<b>13.927.500</b>	100	99,77
	sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	13.960.185	1	13.927.500	100	99,77
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	1	<b>455.599.507</b>	1	<b>452.332.730</b>	100	99,28
	sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	179.999.507	1	179.282.730	100	99,60
	sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1	275.600.000	1	273.050.000	100	99,07
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	1	<b>117.908.750</b>	1	<b>114.472.750</b>	100	97,09
	sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	17.438.750	6	14.752.750	100,00	84,60
	sub kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	100.470.000	3	99.720.000	100,00	99,25
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan wil 2	Kg	1.832.340	444.718.947	2.202.160	<b>394.854.053</b>	120,183	88,79
			PAD Pelabuhan wil 2	Rp	165.850.000		179.765.000		147,344	
	Keg. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		Jumlah SPB(Surat Perintah Berlayar) yang diterbitkan	surat	785	127.761.967	384	<b>112.917.056</b>	48,92	88,38
	sub kegiatan Penyediaan		Jumlah Prasarana	Unit	2		2		100	

# Laporan Kinerja Perangkat Daerah 2023

Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			127.761.967		112.917.056		88,38
Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Jumlah pelabuhan yang dikelola di wil II	pelabuhan	2	316.956.980	2	<b>281.936.997</b>	100	88,95
sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah II	balok	4.200	239.956.980	10.041	205.036.997	239,07	85,45
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	6		6		50	
sub kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	layanan	8	77.000.000	8	76.900.000	87,5	99,87
<b>UPT PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III</b>									
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Nilai survei kepuasan pelanggan	nilai	80	<b>1.283.591.264</b>	80	<b>1.275.428.922</b>	100	99,36
Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	laporan	1	<b>172.452.681</b>	1	<b>169.052.681</b>	100	98,03
sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	1	156.270.000	1	152.870.000	100	97,82
sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	1	16.182.681	1	16.182.681		100,00
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	laporan	1	<b>33.557.937</b>	1	<b>33.557.819</b>	100	100,00
sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	14.907.287	1	14.907.169	100	100,00
sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	18.650.650	1	18.650.650	100	100,00
Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	<b>952.080.646</b>	1	<b>948.677.522</b>	100	99,64
sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	5.880.000	1	5.880.000	100	100,00
sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	640.791.520	1	640.590.370	100	99,97
sub kegiatan Penyediaan		Jumlah laporan	Laporan	1		1		100	

# Laporan Kinerja Perangkat Daerah 2023

Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			37.259.126		37.257.152		99,99
sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan	1	268.150.000	1	264.950.000	100	98,81
Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	<b>125.500.000</b>	1	<b>124.140.900</b>	100	98,92
sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	65.980.000	2	64.625.900	100	97,95
sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	29.520.000	2	29.520.000	100	100,00
sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	unit	1	30.000.000	1	29.995.000	100	99,98
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan wil III	Kg	685.443	495.568.818	673.665	<b>492.540.950</b>	98,282	99,39
		PAD Pelabuhan wil III	Rp	1.013.550.000		1.013.582.000		198,742	
Keg. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		Jumlah SPB (Surat Perintah Berlayar) yang diterbitkan (wil III)	Surat	135	218.962.000	184	<b>218.396.000</b>	136,30	99,74
sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	28.550.000	1	28.550.000	100	100,00
sub kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		1	190.412.000	1	189.846.000	100	99,70
Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Jumlah pelabuhan yang dikelola di wilayah III	Unit	2	276.606.818	2	<b>274.144.950</b>	100	99,11
sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah III	balok	11.900	238.351.818	30.226	235.969.950	254,00	99,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	unit	6		6		50	
sub kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	layanan	7	38.255.000	7	38.175.000	100	99,79
<b>UPT PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV</b>									
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat	Nilai survei kepuasan pelanggan (nilai)	Nilai	80	<b>668.453.176</b>	80	<b>660.399.059</b>	100	98,80

# Laporan Kinerja Perangkat Daerah 2023

daerah									
Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	laporan	1	<b>118.472.000</b>	1	<b>118.459.325</b>	100	99,99
sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	118.472.000	1	118.459.325	100	99,99
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	Laporan	1	<b>49.023.471</b>	1	<b>48.999.190</b>	100	99,95
sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	49.023.471	1	48.999.190	100	99,95
Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	<b>356.298.825</b>	1	<b>348.329.944</b>	100	97,76
sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	228.060.000	1	220.091.944	100	96,51
sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan	1	128.238.825	1	128.238.000	100	100,00
Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	Laporan	1	<b>144.658.880</b>	1	<b>144.610.600</b>	100	99,97
sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	Unit	1	127.768.880	1	127.754.600	100	99,99
sub kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	Unit	1	16.890.000	1	16.856.000	100	99,80
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah IV	Kg	1.389.988	569.441.503	1.615.000	<b>564.013.839</b>	116,19	99,05
		PAD Pelabuhan Wilayah IV	Rp1.000	230.000.000		209.760.000		101,83	
Keg. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		Ketersediaan syahbandar perikanan	Orang	1	299.711.758	1	<b>295.128.989</b>	100	98,47
sub kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	dokumen	2	299.711.758	1	295.128.989	50	98,47
Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	1	269.729.745	1	<b>268.884.850</b>	100	99,69
sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah pelabuhan yang dikelola di wilayah IV	Pelabuhan	7.529	217.826.984	5.995	217.418.600	88,70	99,81
		Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah IV	Balok	6		6		50	
sub kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang	unit	5	51.902.761	5	51.466.250	100	99,16

# Laporan Kinerja Perangkat Daerah 2023

			Tersedia							
UPT KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TOMINI										
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	Unit	80	156.919.649	80	156.757.300	100	99,90	
Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	1	35.810.000	1	35.810.000	100	100,00	
sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	35.810.000	1	35.810.000	100	100,00	
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	Laporan	1	39.751.302	1	39.596.050	100	99,61	
sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	19.750.000	1	19.600.000	100	99,24	
sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	9.998.978	1	9.997.300	100	99,98	
sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	10.002.324	1	9.998.750	100	99,96	
Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	69.013.680	1	69.008.250	100	99,99	
sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	3.213.680	1	3.208.250	100	99,83	
sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1	65.800.000	1	65.800.000	100	100,00	
Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	1	12.344.667	1	12.343.000	100	99,99	
sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Program Pengelolaan Ruang Laut	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit		12.344.667	1	12.343.000	100	99,99	
		Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	%		438.019.399	100	434.341.850	100	99,16	
Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	%	1	323.352.000	70	322.636.000	100	99,78	
sub kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	100	323.352.000	132.189	322.636.000	100	99,78	
		Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional	Ha	292.910,12		292.910,12		100		

# Laporan Kinerja Perangkat Daerah 2023

Keg. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K	%	100	114.667.399	100	<b>111.705.850</b>	100	97,42
sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	10	26.550.000	10	26.550.000	100	100,00
sub kegiatan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok	1	39.100.000	1	39.100.000	100	100,00
sub kegiatan Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	orang	30	49.017.399	30	46.055.850	100	93,96
<b>UPT KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DOBOTO</b>									
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	Nilai	80	<b>153.396.000</b>	80	<b>153.028.000</b>	100	99,76
Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	1	<b>44.760.000</b>	1	<b>44.760.000</b>	100	100,00
sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	44.760.000	1	44.760.000	100	100,00
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	Laporan	1	<b>23.656.000</b>	1	<b>23.538.000</b>	100	99,50
sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	13.800.000	1	13.800.000	100	100,00
sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	9.856.000	1	9.738.000	100	98,80
Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	<b>60.000.000</b>	1	<b>60.000.000</b>	100	100,00
sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1	60.000.000	1	60.000.000	100	100,00
Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	<b>24.980.000</b>	1	<b>24.730.000</b>	100	99,00
sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	24.980.000	1	24.730.000	100	99,00
Program Pengelolaan Ruang Laut	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau	%	100	323.419.200	100	<b>306.117.200</b>	100	94,65

	berkelanjutan	Kecil								
Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	%	70	182.957.200	70	<b>179.387.200</b>	100	98,05	
sub kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	132.189	82.287.200	132.189	79.271.200	100	96,33	
		Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional	Ha	60.042,72		60.042,72		100		
sub kegiatan Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil		Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	3	100.670.000	3	100.116.000	100	99,45	
Keg. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K	%	100	140.462.000	100	<b>126.730.000</b>	100	90,22	
sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	10	30.000.000	10	29.990.000	100	99,97	
sub kegiatan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok	1	40.462.000	1	28.990.000	100	71,65	
sub kegiatan Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	orang	30	70.000.000	30	67.750.000	100	96,79	
<b>UPT KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL BANGGAI</b>										
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	nilai	80	<b>192.799.214</b>	80	<b>188.867.214</b>	100	97,96	
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	Laporan	1	<b>112.099.214</b>	1	<b>108.167.714</b>	100	96,49	
sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	112.099.214	1	<b>108.167.714</b>	100	96,49	
Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	<b>80.700.000</b>	1	<b>80.699.500</b>	100	100,00	
sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	9.900.000	1	<b>9.899.500</b>	100	99,99	
sub kegiatan Penyediaan		Jumlah laporan	Laporan	1		1		100		

Jasa Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			70.800.000		<b>70.800.000</b>		100,00
Program Pengelolaan Ruang Laut	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	%	100	210.183.400	100	<b>173.572.390</b>	99,9	82,58
Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	%	70	210.183.400	70	<b>173.572.390</b>	100,00	82,58
sub kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	132.189	179.923.400	132.189	150.862.390	100	83,85
		Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional	Ha	856.649,13		856.649,13		100	
sub kegiatan Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil		Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	3	30.260.000	3	22.710.000	100	75,05
<b>UPT KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL MOROWALI</b>									
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	Nilai	80	<b>175.756.000</b>	80	<b>171.637.932</b>	100	97,66
Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	1	<b>45.106.000</b>	1	<b>42.586.132</b>	100	94,41
sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	45.106.000	1	42.586.132	100	94,41
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	Laporan	1	<b>40.000.000</b>	1	<b>38.401.800</b>	100	96,00
sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan )	paket	1	20.000.000	1	18.851.800	100	94,26
sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	10.000.000	1	9.950.000	100	99,50
sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	10.000.000	1	9.600.000	100	96,00
Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	<b>78.200.000</b>	1	<b>78.200.000</b>	100	100,00
sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	18.200.000	1	18.200.000	100	100,00
sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1	60.000.000	1	60.000.000	100	100,00
Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		Jumlah laporan Pemeliharaan	laporan	1	<b>12.450.</b>	1	12.450.0	100	100,00

Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			000		00		
sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	12.450.000	1	12.450.000	100	100,00
Program Pengelolaan Ruang Laut	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	%	100	247.000.000	100	<b>234.473.483</b>	100	94,93
Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	%	70	137.000.000	70	<b>134.268.947</b>	100	98,01
sub kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	132.189	107.000.000	132.189	104.368.947	100	97,54
		Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional	Ha	292.910,12		292.910,12		100	
sub kegiatan Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil		Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	3	30.000.000	3	29.900.000	100	99,67
Keg. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K	%	100	110.000.000	100	<b>100.204.536</b>	100	91,10
sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	10	30.000.000	10	22.763.046	100	75,88
sub kegiatan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	kelompok	1	40.000.000	1	39.920.000	100	99,80
sub kegiatan Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	orang	30	40.000.000	30	37.521.490	100	93,80

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis (SS) – 1 *indeks reformasi birokrasi*, DKP didukung anggaran Rp32.158.211.959,- dan terealisasi sebesar RP30.002.758.768,- atau sebesar 93,30%.

Untuk mencapai sasaran strategis (SS) - 2 *meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan*, DKP Sulteng maka didukung anggaran sebesar Rp45.567.580.753,- dan teralisasi Rp42.780.397.713,- atau sebesar 93,88%.

Untuk mencapai sasaran strategis (SS) - 3 *terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan*, DKP Sulteng mendapat dukungan anggaran Rp6.151.465.999,- dan teralisasi Rp4.615.299.345,- atau sebesar 75,03%.

Untuk mencapai sasaran strategis (SS) – 4 *peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing*, dukungan anggaran sebesar Rp54.975.502.630,- dan teralisasi Rp51.986.957.542,- atau sebesar 94,56%,

Dalam upaya mencapai sasaran strategis (SS) 5 *terselenggaranya pengendalian dan pengawasan serta regulasi-deregulasi terkait pengelolaan SDKP*, DKP Sulteng didukung anggaran Rp5.123.330.350,- dan teralisasi Rp4.915.851.599,- atau sebesar 95,95%.

Adapun program-program yang mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan DKP Sulteng, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 22. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
<b>Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah (SS1)</b>							
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	64	67,44	105,38	32.158.211.959	30.002.758.768	93,30
<b>TOTAL SS1</b>		<b>64</b>	<b>67,44</b>	<b>105,38</b>	<b>32.158.211.959</b>	<b>30.002.758.768</b>	<b>93,30</b>
<b>Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan (SS2)</b>							
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Nilai Tukar Perikanan (%)	100,8	103,12	102,30	45.567.580.753	42.780.397.713	93,88

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya							
	TOTAL SS2	100,8	103,12	102,30	45.567.580.753	42.780.397.713	93,88
Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan (SS3)							
Program pengelolaan Ruang Laut	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	19,98	18,22	91,19	6.151.465.999	4.615.299.345	75,03
	TOTAL SS3	19,98	18,22	91,19	6.151.465.999	4.615.299.345	75,03
Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing (SS4)							
Program Pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan (Ton)	972.693,75	1.052.510,18	108,21	50.619.238.467	47.707.866.899	94,25
Program pengelolaan perikanan budidaya							
Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka konsumsi ikan (Kg/kap/th)	57,05	67,36	118,07	4.356.264.163	4.279.090.643	98,23
	TOTAL SS4	972.750,08	1.052.577,54	113,14	54.975.502.630	51.986.957.542	94,56
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan serta regulasi-deregulasi terkait pengelolaan SDKP (SS5)							
Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi pengawasan SDKP (hari operasi)	250	265	106,00	5.123.330.350	4.915.851.599	95,95
	TOTAL SS5	250	265	106,00	5.123.330.350	4.915.851.599	95,95

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat:

1. SS - 1 didukung oleh program penunjang urusan pemerintahan daerah dimana capaian keuangan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah 93,30% dan capaian kinerja 105,38%.
2. SS - 2 didukung oleh 2 (dua) program yakni program pengelolaan perikanan budidaya dan program pengelolaan perikanan tangkap. Capaian kinerja sasaran ini sebesar 102,30% dan capaian realisasi anggaran 93,88%.
3. SS - 3 didukung oleh program pengelolaan ruang laut. Capaian kinerja sasaran ini sebesar 91,19% dan capaian realisasi anggaran 75,03%.
4. SS - 4 didukung oleh 3 (tiga) program yakni program pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya dan program pengolahan dan pemasaran hasil

perikanan. Capaian kinerja sasaran ini sebesar 113,14% dan capaian realisasi anggaran 94,56%.

5. SS - 5 didukung oleh program pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Capaian kinerja sasaran ini sebesar 106,00% dan capaian realisasi anggaran 95,95%.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023 DKP Sulteng mendapat alokasi anggaran (APBD) sebesar Rp98.408.510.938,- dan sampai dengan 31 Desember 2023, terealisasi sebesar Rp91.520.867.254,- atau sebesar 93,00%. Untuk realisasi fisik sebesar 98,30% atau hampir seluruh program kegiatan yang direncanakan pada tahun 2023 dapat terlaksana. Realisasi fisik tidak mencapai 100% disebabkan beberapa alasan yang sifatnya sangat teknis, sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) berasal dari sisa perjalanan dinas, sisa kontrak, sisa pembayaran listrik, air dan telpon. Adapun rekapitulasi APBD yang diterima DKP Sulteng untuk belanja langsung tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja TA. 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulteng

Belanja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Silpa (Rp.)
		(Rp.)	(%)	(%)	
<b>Belanja Operasi</b>	<b>67.439.759.153</b>	<b>62.551.550.885</b>	<b>90,69</b>	<b>98,97</b>	<b>4.888.208.268</b>
- Belanja Pegawai	19.099.748.984	17.204.540.669	90,08	100	1.895.208.315
- Belanja Barang Jasa	28.170.452.391	26.735.460.521	94,91	98,40	1.434.991.870
- Belanja Bantuan Sosial	20.169.557.778	18.611.549.695	92,28	98,80	1.558.008.083
<b>Belanja Modal</b>	<b>30.968.751.785</b>	<b>28.969.316.369</b>	<b>93,54</b>	<b>96,84</b>	<b>1.999.435.416</b>
<b>T O T A L</b>	<b>98.408.510.938</b>	<b>91.520.867.254</b>	<b>93,00</b>	<b>98,30</b>	<b>6.887.643.684</b>

Selain mengelola dana APBD DKP Sulteng juga mengelola dana APBN Dekonsentrasi sebesar Rp2.268.862.000,-. Sampai dengan 31

Desember 2023 terealisasi sebesar Rp2.245.804.404,- atau sebesar 98,98% dan realisasi fisik 100%. Adapun rekapitulasi APBN yang diterima DKP Sulteng tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Alokasi dan Realisasi Anggaran APBN Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Belanja APBD 2023	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
			Keuangan		Fisik
			(Rp.)	(%)	
<b>DEKONSENTRASI (DK)</b>		<b>2.005.917.000</b>	<b>2.000.484.737</b>	<b>99,73</b>	<b>100,00</b>
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	1.096.498.000	1.091.809.271	99,57	100,00
2.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	1.172.364.000	1.153.995.133	98,43	100,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.268.862.000</b>	<b>2.245.804.404</b>	<b>98,98</b>	<b>100,00</b>

### 3.3 Inovasi

Inovasi yang diterapkan DKP Sulteng adalah dengan mengembangkan Sistem Informasi Pengelolaan Ruang Laut dan Pengelolaan Sampah Laut Menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM).

**A. Sistem Informasi Pengelolaan Ruang Laut,** Tahun 2022 DKP Sulteng mengembangkan inovasi berbasis web yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Ruang Laut. Sistem ini menyajikan informasi mengenai (1) pemanfaatan ruang laut, (2) konservasi, pelestarian dan perlindungan kawasan perairan, dan (3) pemberdayaan masyarakat pesisir.

Tujuan dari inovasi ini adalah untuk memudahkan masyarakat umum dalam mengakses data mengenai pengelolaan ruang laut di Sulawesi Tengah, dimana pengguna bisa mendapatkan informasi tanpa harus datang langsung ke DKP Sulteng. Sistem informasi ini terintegrasi langsung dengan website DKP Sulteng berupa link yang disediakan untuk dapat mengakses sistem informasi ini.



Gambar 16. Halaman Depan Sistem Informasi Pengelolaan Ruang Laut

**B. Pengelolaan Sampah Laut menjadi BBM**, Tahun 2023 DKP Sulteng melalui Bidang Pengelolaan Ruang Laut menginisiasi pelatihan inovasi mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar. BBM yang dihasilkan dapat digunakan oleh nelayan untuk melaut. Adapun yang menjadi sasaran adalah perwakilan masyarakat, kelompok masyarakat, aparat desa dan puskesmas di 12 kab/kota di Sulawesi Tengah.

Pengolahan sampah plastik menjadi BBM dilakukan menggunakan metode pirolisis, yaitu proses degradasi suatu material dengan suplai panas yang berjalan tanpa melibatkan oksigen atau dengan oksigen namun dengan jumlah sangat sedikit menghasilkan produk dalam bentuk padat, cair, dan gas. Pada metode ini, selama pirolisis, plastic akan terurai menjadi uap. Uap yang dihasilkan akan melewati kondensor dan mendingin atau mengubahnya menjadi cairan. Cairan tersebut akan menetes dan ditampung didalam wadah dan menjadi BBM yang dapat digunakan. Tabung pertama akan menghasilkan solar, tabung dua menghasilkan minyak tanah dan tabung tiga menghasilkan bensin.

Peralatan yang digunakan cukup sederhana, yaitu: tabung reactor untuk melakukan proses pirolisis pada sampah plastik (tabung bekas Freon Ac), system pemanas api (tungku/blower

api), pipa kondesor dan wadah/botol penyimpanan. Sedangkan bahan yang digunakan adalah sampah plastik berupa botol plastic, kantong plastik, dan potongan-potongan plastik lainnya (umumnya plastik PP/HDPE) yang telah dikecilkan ukurannya dengan cara dicacah. Bahan lain yaitu air pendingin untuk mendinginkan pipa.

Pengolahan sampah plastik dengan cara ini dapat mengatasi dua permasalahan penting yaitu pencemaran sampah plastik dan pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak yang dapat dipergunakan untuk perahu nelayan. Bahkan dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi serta membuka lapangan kerja. Inovasi ini sudah dilakukan oleh beberapa kelompok binaan DKP Sulteng dan produk BBMnya sudah digunakan oleh nelayan di beberapa lokasi di Kota Palu.



Gambar 17. Pelatihan Inovasi Sampah Plastik Menjadi BBM

### 3.4 Penghargaan

Tahun 2023 DKP Sulteng mendapat penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas perolehan predikat A pada hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) Tahun 2022 yaitu dengan nilai 83,80.

Evaluasi AKIP dilakukan setiap tahun oleh Inspektorat Daerah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan oleh instansi pemerintah, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP secara konsisten dan berkelanjutan.

Pencapaian hasil evaluasi AKIP DKP Sulteng terus meningkat setiap tahunnya, ini merupakan bentuk upaya peningkatan kinerja yang terus dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintah yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.



Gambar 18. SAKIP A DKP Sulteng Tahun 2022

**BAB IV  
P E N U T U P****4.1. Kesimpulan**

Secara umum realisasi kinerja DKP Sulteng tahun 2023 sudah baik, meskipun masih ada 1 (satu) capaian indikator yang tidak mencapai target. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang sifatnya teknis. Capaian yang disampaikan pada laporan inipun masih merupakan angka sementara dimana masih ada beberapa data yang belum masuk atau belum selesai proses penghitungannya. Nilai capaian tersebut diprediksi akan meningkat seiring dengan selesainya kegiatan pengumpulan dan penghitungan data.

Tahun 2023 DKP Sulteng didukung oleh dana APBD dan APBN, masing-masing sebesar Rp98.408.510.938,- untuk APBD dan Rp2.268.862.000,- untuk APBN. Sampai dengan 31 Desember 2023 dana APBD teralisasi 93,00% untuk keuangan dan fisik 98,30. Dana APBN terealisasi 98,98% untuk keuangan dan 100% untuk realisasi fisik. Hal ini menunjukkan penyerapan anggaran DKP pada tahun 2023 sudah baik.

**4.2. Saran**

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan, maka sinergitas antara pusat dan daerah, antar bidang dan UPTD serta peran serta dari seluruh stakeholders terkait dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan sangat diperlukan. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah:

1. Perencanaan yang terintegrasi antara setiap bidang, UPT dan stakeholders terkait mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk pencapaian target.
2. Kerjasama dan koordinasi yang terus menerus pada tahap pelaksanaan dan pengawasan kegiatan

3. Pertimbangan aspirasi dari pelaku-pelaku perikanan seperti nelayan, pembudidaya, pengolah perikanan dan pelaku usaha lain yang berperan dalam pembangunan kelautan dan perikanan.

\*) Angka sementara

# L A M P I R A N

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah I : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun Anggaran : 2023

Jumlah Anggaran : Rp 70.806.056.746,-

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	- Nilai Tukar Perikanan	100,8
2	Terwujudnya pengelolaan Sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	- Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	19,98
3	peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	- Produksi Perikanan (ton)	1.516.768,98
		- Angka Konsumsi Ikan (kg/perkapita/tahun)	57,05
4	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan serta regulasi-deregulasi terkait pengelolaan SDKP	- Jumlah Hari Operasi Pengawasan SDKP (hari Operasi)	250

Palu, Juli 2022

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**H. MOH. ARIF LATJUBA, SE., M.Si**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. Moh. Arif Latjuba, SE, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. Rusdy Mastura**

Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Februari 2023

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA  
  
H. RUSDY MASTURA

  
H. MOH. ARIF LATJUBA, SE, M.Si

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

<b>No.</b> <i>(1)</i>	<b>Sasaran Strategis</b> <i>(2)</i>	<b>Indikator Kinerja</b> <i>(3)</i>	<b>Target</b> <i>(4)</i>
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	64
2	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Perikanan	100,8
3	Terwujudnya pengelolaan Sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	19,98
4	Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	Produksi Perikanan (ton)	1.516.768,98
		Angka Konsumsi Ikan (kg/perkapita/tahun)	57,05
5	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan serta regulasi-deregulasi terkait pengelolaan SDKP	Jumlah Hari Operasi Pengawasan SDKP (hari Operasi)	250

Jumlah Anggaran : Rp 63.585.867.577,-

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	28.462.867.041	APBD
02 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	18.190.196.808	APBD
03 Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya	5.382.826.439	APBD
04 Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2.088.148.281	APBD
05 Program Pengelolaan Ruang Laut	2.346.815.586	APBD
06 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	2.159.649.564	APBD
07 Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	1.819.999.858	APBD
08 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	723.126.000	APBN-Dekon
09 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	167.700.000	APBN-TP
10 Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya	1.145.056.000	APBN-Dekon
11 Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	643.960.000	APBN-Dekon
12 Program Kualitas Lingkungan Hidup	350.240.000	APBN-Dekon
13 Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	185.282.000	APBN-Dekon

Palu, Februari 2023

GUBERNUR SULAWESI TENGAH



H. RUSDY MASTURA

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN  
PERIKANAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



H. MOH. ARIF LATJUBA, SE, M.Si

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2021 - 2026**

- Instansi** : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
- Tujuan** : Peningkatan PDRB dan Penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin Kelautan dan Perikanan Berbasis Pengelolaan Sdkp yang Berkeadilan dan Berkelanjutan
- Tugas** : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi
- Fungsi** : 1) Perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
4) Pelaksanaan administrasi dinas perikanan bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait tugas dan fungsinya

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1. Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	1. Nilai Tukar Perikanan	Indeks yang diterima nelayan / Indeks yang dibayar nelayan x 100	Data Indeks harga yang diterima nelayan / pembudidaya (It) dan Indeks harga yang dibayar nelayan / pembudidaya (Ib) kab/kota	Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP
2. Terwujudnya pengelolaan Sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	1. Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	Kawasan lindung perairan / Total luas perairan teritorial	Data kawasan perairan yang dilindungi di kab/kota	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan UPT Konservasi Wilayah I, II, III & IV
3. peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	1. Produksi Perikanan (ton)	Jumlah Produksi Ikan (Ton) / Target Daerah (Ton) x100%	Data Produksi Perikanan Kab/Kota	Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP, UPT Balai Perbenihan Perikanan dan UPT Pelabuhan Wilayah I, II, III & IV
	2. Angka Konsumsi Ikan (kg/perkapita/tahun)	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) / Target Daerah (Kg) x100%	Data Jumlah ikan (kg) yang dikonsumsi oleh rata-rata penduduk pertahun kab/kota	Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP dan UPT PMHP
4. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan serta regulasi-deregulasi terkait pengelolaan SDKP	1. Jumlah Hari Operasi Pengawasan SDKP (hari Operasi)	Jumlah hari operasi yang dilakukan oleh aparat pengawasan kelautan dan perikanan baik melalui: (a) Pengawasan Ruang Laut; (b) Pengawasan Budidaya/ P2HP dan © Pengawasan Terpadu Kelautan dan Perikanan	Data pelaku usaha perikanan kab/kota yang memiliki dasar hukum	Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**H. MOH. ARIF LATIHA, SE, M.Si**  
NIP. 19660418 199203 1 009